

**SEKURITISASI MIGRASI POLANDIA TERHADAP
ILLEGAL MIGRANT IRAK-SURIAH DI PERBATASAN
BELARUSIA TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

LINDA YULIANTI

20323208

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

**SEKURITISASI MIGRASI POLANDIA TERHADAP MIGRAN
TIMUR-TENGAH TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

LINDA YULIANTI

20323208

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**SEKURITISASI MIGRASI POLANDIA TERHADAP
ILLEGAL MIGRANT IRAK-SURIAH DI PERBATASAN
BELARUSIA TAHUN 2021-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

9 Januari 2026

Mengesahkan



Dewan Penguji

- 1 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 2 Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.
- 3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

17 Desember, 2025

Linda Yulianti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	18
1.8.1 Jenis Penelitian	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	19
1.8.4 Proses Penelitian	20
1.9 Sistematika Pembahasan	21
BAB 2 DINAMIKA DAN PERMASALAH MIGRAN TIMUR TENGAH DI POLANDIA	22
2.1 Dinamika Gelombang Migrasi Migran Timur Tengah ke Polandia tahun 2021-2022	22
2.2 Krisis Migran Timur-Tengah ke Polandia Tahun 2021-2022	26
2.3 Dampak Migran Timur-Tengah terhadap Polandia Tahun 2021-2022	

	31
BAB 3 SEKURITISASI MIGRAN POLANDIA 2021 - 2022	33
3.1 PenerapanAspek Institusional Pemerintah Polandia Terhadap Migran Timur Tengah	33
3.1.1 <i>Penerapan Legal Component Pemerintah Polandia terhadap Migran Timur-Tengah</i>	35
3.1.1.1 <i>Article 303b of the Polish Foreigners Act</i>	36
3.1.1.2 <i>Amandement to the Act on Foreigners</i>	40
3.1.1.3 <i>Polish Border Guard Act</i>	40
3.1.1.4 <i>State of Emergency Regulation (2021)</i>	41
3.1.2 <i>Policy Statement Pemerintah Polandia Merespon Migran Timur-Tengah</i>	44
3.1.2.1 <i>Pernyataan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki</i>	45
3.1.2.2 <i>Pertanyaan Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi Mariusz Kaminski</i>	45
3.1.2.3 <i>Pembangunan Tembok Perbatasan Pernyataan Kebijakan Ministry of Defence</i>	46
3.1.3 <i>Saliency Receptive Audience Polandia</i>	46
3.1.3.1 <i>Media Agents Opini Publik</i>	47
3.1.3.1 <i>Political Agents Implication of Policy Statement</i>	49
3.2 Penerapan Sekuritisasi Nexus Pemerintah Polandia Terhadap Migran Timur Tengah	55
3.2.1 <i>Interdiction sebagai Praktik Pencegahan dalam Sekuritisasi Migrasi</i>	55
3.2.2 <i>Detention of Immigrants Penahanan sebagai Praktik Represif dan Disipliner</i>	57
BAB 4 PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
69	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. *Detection of Illegal Border Crossing at UE's External Borders*
- Gambar 2. Arus Migrasi Migran Timur Tengah ke Perbatasan Polandia Melalui Belarusia
- Gambar 3. Perbatasan Polandia – Belarusia
- Gambar 4. *Applicants for International Protection by Citizenship in 2021*
- Gambar 5. Peta rute Migrasi Migran Timur Tengah melalui Turki Menyebrangi Greece tahun 2015
- Gambar 6. Promosi Tur Wisata ke Belarusia di Media Sosial Facebook
- Gambar 7. *Data Migran Illegal yang menyebrangi EU's Eastern Land Border*
- Gambar 8. Promosi Pembuatan Visa Mudah ke Belarusia di Media Sosial Facebook
- Gambar 9. Migran Irak Mendapatkan Visa dan Tiket Pesawat dari Baghdad Menuju Dubai
- Gambar 10. Transit Dubai Airport menuju Minsk Airport
- Gambar 11. Penyebaran Informasi Titik Kumpul Migran ke Perbatasan Polandia di Media Sosial Facebook
- Gambar 12. Lokasi Titik Kumpul Migran di Belarusneft Gas Station Belarusia
- Gambar 13. *Crossing the State Border in Violation of Regulations in the Years 2018 – 2021, on the Section with Belarusia*
- Gambar 14. Melintasi Perbatasan Negara Secara Melanggar Peraturan, dibagian Perbatasan dengan Belarusia, Dirinci berdasarkan Bulan
- Gambar 15. Melintasi Perbatasan Negara secara Melanggar Peraturan, di Bagian Perbatasan dengan Belarusia, Sesuai dengan Pembagian Pos Penjaga Perbatasan
- Gambar 16. Arus Migrasi Migran Ilegal Timur Tengah ke Perbatasan Polandia melalui Belarusia
- Gambar 17. *Number of Decisions Regarding International Protection Issued by Head of the Office Foreigners in 2021*
- Gambar 18. *First Instance Decisions on International Protection 2022 in Poland*
- Gambar 19. *Statistic Applications and Granting of Protection Status at First Instance 2021 in Poland*
- Gambar 20. Legal Framework Asylum Procedure

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Profil Migran Ilegal dan Respons Kebijakan Polandia (2021-2022)
- Tabel 2. Hipotesis Indikator Sekuritisasi Migrasi
- Tabel 3. *Open Joint Stock Company “Belavia Belarusian Airlines” - (AAT «Авіакомпанія «Белавія» or АО «Белавия Авиалайнс»)*
- Tabel 4. *Republican Unitary Enterprise “TSENTRKURORT” - Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ”*
- Tabel 5. *LLC Oskartour - ООО Оскартур*
- Tabel 6. *Republican Subsidiary Unitary Enterprise “Hotel Minsk” - Гатэль «МІНСК Рэспубліканскае дочернее унітарнос предприятие «ОТЕЛЬ «МИНСК»*
- Tabel 7. *Open Joint Stock Company “Hotel PLANETA” – AAT «ГАСЦІНІЦА ПЛАНЕТА» ОАО «ГОСТИНИЦА ПЛАНЕТА»*
- Tabel 8. *ASAM (Asobnaia Sluzhba Aktyunyunyk Merapryemstvau) - Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)*
- Tabel 9. *Cham Wings Airlines*
- Tabel 10. *VIP Grub*
- Tabel 11. Regulasi Terkait Sekuritisasi Migrasi Polandia 2021 – 2022
- Tabel 12. Framing Media Utama Polandia Tahun 2021
- Tabel 13. Survei Sentimen Publik Polandia Terkait Migran Timur Tengah Tahun 2021
- Tabel 14. *Saliency - Prime Minister Mateusz Morawiecki*
- Tabel 15. *Saliency - Minister of Interior Mariusz Kaminski*
- Tabel 16. *Saliency – President Andrzej Duda*
- Tabel 17. Praktik Interdiction Pemerintah Polandia Tahun 2021-2022
- Tabel 18. Praktik Penahanan Migran Timur Tengah di Polandia Tahun 2021-2022
- Tabel 19. Jumlah Migran Timur Tengah yang ditahan tahun 2020 - 2022
- Tabel 20. *Summarize Indicators*, sekuritisasi migrasi Polandia terhadap Migran Timur Tengah tahun 2021 – 2022

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Framing Media Utama Polandia tahun 2021

Grafik 2. *Type of Legal Status of Migran to Poland*

Grafik 3. Jumlah Migran Timur Tengah yang Ditahan 2020-2022

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. *Indicators “The Securitization of Migrations Theory” by Phillipe Bourbeau*

Bagan 2. Asylum Procedure in Poland 2021

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji respons Polandia terhadap krisis migrasi di perbatasan Belarusia pada 2021–2022, dengan fokus pada proses sekuritisasi terhadap migran ilegal Timur Tengah di perbatasan Polandia Belarusia. Berdasarkan teori Philippe Bourbeau, analisis dilakukan terhadap dua dimensi: aspek institusional yang meliputi perubahan hukum, *policy statement*, dan peran media; serta praktik keamanan seperti *pushback*, pendirian tembok perbatasan, dan penahanan massal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Polandia tidak hanya mengelola migrasi ilegal sebagai masalah administratif, tetapi secara sistematis mengonstruksinya sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional, identitas budaya, dan stabilitas wilayah Uni Eropa. Dengan demikian, kebijakan yang diambil mencerminkan upaya untuk mengamankan kedaulatan melalui pendekatan represif yang dilegitimasi oleh wacana keamanan.

Kata kunci: sekuritisasi migrasi, kebijakan Migrasi, migran Timur Tengah, Polandia, keamanan

ABSTRACT

This study examines Poland's response to the migration crisis on the Belarusian border in 2021–2022, focusing on the securitization process of illegal Middle Eastern migrants on the Polish-Belarusian border. Based on Philippe Bourbeau's theory, the analysis is conducted across two dimensions: institutional aspects, including legal changes, policy statements, and the role of the media; and security practices such as pushbacks, border wall construction, and mass displacement. The results show that the Polish government not only manages illegal migration as an administrative issue but also systematically constructs it as an existential threat to national security, cultural identity, and the stability of the European Union. Therefore, the policies adopted reflect an effort to ensure safety through a repressive approach legitimized by security discourse.

Keywords: migration securitization, immigration policy, Middle Eastern migrants, Poland, security

BAB 1

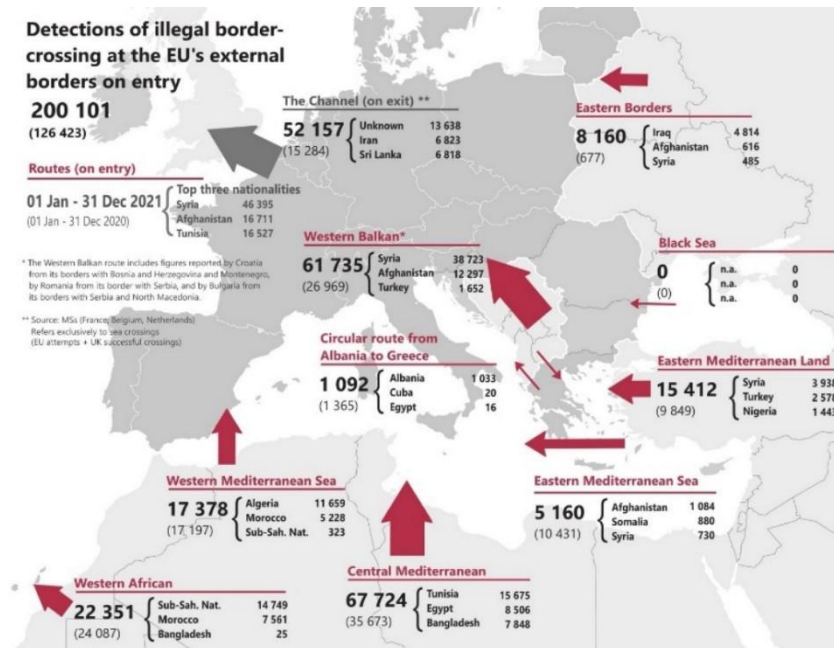
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak pertengahan 2021, perbatasan timur Polandia yang berbatasan langsung dengan Belarusia menjadi episentrum dari krisis migrasi yang kompleks dan berlapis. Ribuan migran khususnya Irak dan Suriah tiba di Belarusia secara legal dengan visa turis lalu bergerak menuju Polandia secara ilegal sebagai pintu masuk ke Uni Eropa. Fenomena ini bukanlah peristiwa baru, melainkan kelanjutan dari dinamika migrasi global pasca-krisis Suriah 2015 (Zdanowicz 2023).

Gelombang migrasi tahun 2021 menuju Uni Eropa (UE) berdasarkan data *Frontex Annual Risk Analysis* merupakan angka tertinggi sejak gelombang migrasi tahun 2017. Pada tahun 2021 dengan jumlah total migran yang melakukan penyeberangan perbatasan ilegal mencapai 200.000. Gelombang migrasi ilegal di *eastern border land* Uni Eropa (melalui Belarusia menyebrangi perbatasan Polandia, Latvia, Lithuania) menjadi salah satu jalur yang paling banyak mengalami kenaikan signifikan sekitar 8.160 penyeberangan perbatasan ilegal yang terdeteksi pada bulan Agustus – September 2021, yang dimana warga Irak (4.814) yang menjadi warga negara yang paling banyak dilaporkan dari orang-orang yang terdeteksi melintasi *eastern border land* tanpa izin, diikuti oleh warga Syria (485) (ARA, 2022).

Gambar 1. Detections of Illegal Border Crossing at UE's External Borders

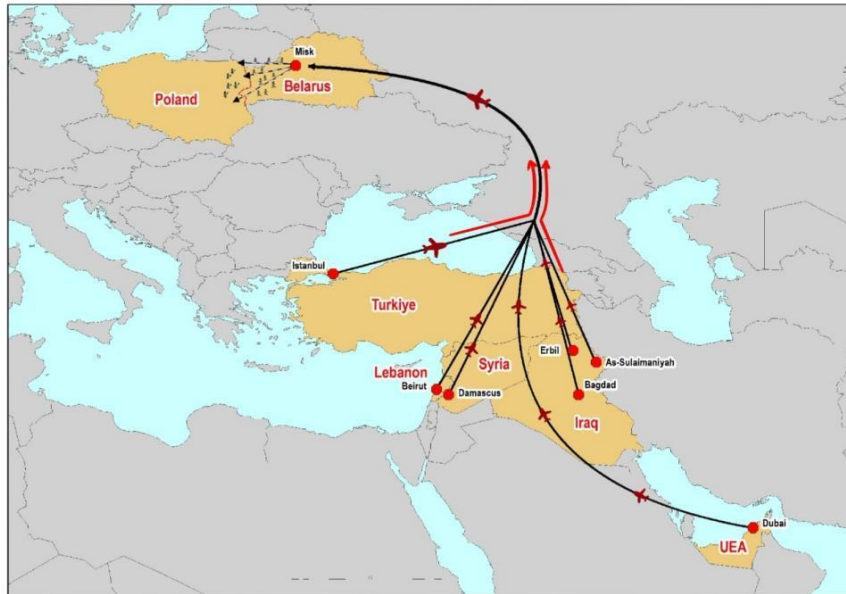


(Sumber: Frontex Annual Risk Analysis for 2022/2023)

Dilain sisi di akhir tahun 2021, berdasarkan data *the Border Guard of Poland* mencatat 39.697 migran mencoba menyeberangi perbatasan Polandia melalui Belarusia. Lonjakan ekstrem dari mayoritas populasi berasal dari negara Timur Tengah secara ilegal, yang mayoritas berasal dari Irak dan diikuti Syria yang memperoleh “*group tourist visas*” Belarusia (Straz Graniczna, 2022).

Belarusia dalam konteks ini berperan aktif sebagai negara transit. Pemerintah Belarusia memfasilitasi arus Migran melalui penerbangan langsung dan ini menjadi simbol dari konflik geopolitik, di mana migrasi digunakan sebagai alat untuk menekan Uni Eropa (Coakley and Patin 2022).

Gambar 2. Arus Migrasi Migran Ilegal Timur Tengah ke Perbatasan Polandia melalui Belarusia



(Sumber: Penulis Mengambil dari Beberapa Sumber)

Peta arus migrasi migran Timur Tengah menuju Uni Eropa melalui Belarusia menuju perbatasan Polandia. Ribuan migran dari Timur Tengah menggunakan jalur udara untuk mencapai Belarusia sebelum mencoba menyeberang ke Uni Eropa melalui Polandia. Kota-kota yang ditandai dengan garis hitam sebagai jalur penerbangan langsung ke Minsk adalah Istanbul, Antalya, Beirut, Bagdad, dan Dubai. Belarusia telah menjadi titik transit utama bagi migran yang ingin masuk ke Uni Eropa melalui jalur *eastern border land*.

Gambar 3. Perbatasan Polandia - Belarusia



(Sumber: Polish Border Guard)

Peta ini menunjukkan perbatasan antara Polandia, dengan beberapa titik perlintasan utama seperti Kuznica, Bruzgi, dan Bialowieza. Peta ini menggambarkan jalur yang digunakan oleh ribuan migran ilegal dari Timur Tengah yang mencoba memasuki Uni Eropa melalui perbatasan Belarusia Polandia.

Dalam migrasi ini Polandia dipilih sebagai titik migrasi strategis karena dua alasan utama:

1. Sebagai negara anggota Uni Eropa yang berbatasan langsung dengan Belarusia menawarkan jalur darat yang relatif lebih terjangkau dibandingkan rute Mediterania yang lebih berisiko dan mahal.
2. Persepsi adanya celah kebijakan dan tekanan eksternal terhadap Polandia menjadikannya target bagi migran yang berharap dapat mengakses sistem suaka Eropa melalui jalur darat (ACAPS 2022).

Respons Polandia terhadap lonjakan migrasi ini bersifat sekuritisasi. Pemerintah membangun tembok perbatasan sepanjang 186 km, menerapkan kebijakan penolakan paksa terhadap migran di perbatasan tanpa proses hukum (*Pushback*), dan membatasi akses terhadap prosedur suaka serta bantuan kemanusiaan (Balicki 2022).

Untuk memperjelas dinamika migrasi dan respons kebijakan yang diambil oleh pemerintah Polandia selama krisis perbatasan 2021, bagian berikut menyajikan data komparatif yang merangkum profil migran yang tercatat berdasarkan data resmi The European Migration Network (EMN) Annual Report on Migration and Asylum in Poland 2021.

Gambar 4. Applicants for International Protection by Citizenship in 2021



(Sumber: EMN Annual Report on Migration and Asylum in Poland, 2021)

Data diatas merupakan data kewarganegaraan campuran migran legal dan ilegal yang mengajukan permohonan perlindungan internasional dan data ber-highlight pink menunjukan migran asal Timur Tengah.

Tabel 1. Profil migran Ilegal dan Respons Kebijakan Polandia (2021-2022)

Asal Migran	Motif Utama	Jalur Masuk	Respons Polandia
Irak, Suriah	Konflik, represi, krisis ekonomi	Visa turis ke Belarusia menuju perbatasan Polandia	<i>Pushback</i> , penolakan suaka, penahanan
Maroko, Sudan	Ketidakstabilan politik, migrasi ekonomi	Jalur udara ke Minsk	Penahanan <i>administrative</i> , deportasi
Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan	Ketidakamanan regional, Migrasi kerja	Transit Belarusia	Penolakan masuk, pembatasan visa

(Sumber: ACAPS 2022; Gov.pl 2022; Balicki 2022)

Tabel ini menunjukkan bahwa respons kebijakan Polandia terkait migran Ilegal yang melakukan penyebrangan melalui wilayah Belarusia memasuki Polandia.

Secara hukum, kebijakan sekuritisasi Polandia selama periode 2021–2022 didukung oleh perubahan regulasi yang signifikan. Di antaranya adalah Regulasi Eksekutif Agustus 2021 yang memungkinkan pengusiran Migran tanpa proses hukum formal, serta amandemen Oktober 2021 terhadap *Act on Foreigners* yang memperkenalkan Pasal 303b sebagai dasar legalisasi *pushback* (Baranowska 2021).

Revisi pada Januari 2022 memperlonggar izin tinggal dan kerja bagi Migran ekonomi (Migran pencari kerja), namun memperketat kontrol terhadap migrasi dari negara-negara berisiko tinggi (negara yang dinilai memiliki potensi tinggi terhadap risiko keamanan atau migrasi tidak teratur) (Gov.pl 2022).

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa sekuritisasi migrasi yang diberlakukan oleh pemerintah Polandia bersifat *security oriented*, yang dimana migran yang terbang menuju Belarusia menggunakan visa turis Belarusia untuk memasuki Polandia tanpa dokumen pendukung lengkap akan dianggap ilegal dan dikriminalisasi, dianggap sebagai bentuk ancaman domestik. Dengan demikian fokus Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya *filtering* atau *framing* sekuritisasi migrasi yang dilakukan Polandia terhadap para migran yang dianggap sebagai ancaman. Topik ini menarik untuk dibahas karena tidak banyak Penelitian yang telah dilakukan mengenai sekuritisasi migrasi terhadap migran Ilegal di Polandia tahun 2021-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Polandia dalam melakukan sekuritisasi migrasi terhadap Migran Irak - Suriah pada tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permasalahan dinamika Migran Timur-Tengah menjadi objek politisasi dan sekuritisasi Polandia tahun 2021 - 2022
2. Untuk mengetahui fenomena sekuritisasi migrasi melalui institusional dan sekuritisasi *nexus* terhadap Migran Irak - Suriah di Polandia tahun 2021 – 2022.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tahun 2021 sebagai respons terhadap lonjakan signifikan migrasi ilegal di perbatasan Polandia–Belarusia yang jauh melampaui tren tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang Januari hingga September 2021, tercatat 9.287 migran ilegal, dengan eskalasi ekstrim terjadi hanya dalam dua bulan (Agustus hingga September) yang menyumbang hampir 8.000 kasus. Lonjakan ini memicu pembentukan kebijakan darurat oleh *Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji* (MSWiA) atau Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi, termasuk revisi regulasi keMigrasian dan pengesahan undang-undang pembangunan tembok perbatasan. Fokus penelitian diarahkan pada periode ini karena merupakan titik balik dalam pendekatan keamanan Polandia terhadap migrasi, yang secara drastis mengubah lanskap hukum dan institusional.

Penelitian ini secara metodologis dibatasi hingga tahun 2022 karena tahun tersebut menandai puncak konkretisasi kebijakan sekuritisasi, seperti implementasi *pushback*, kriminalisasi LSM, penahanan, dan pembangunan tembok perbatasan. Setelah 2022, dinamika migrasi di kawasan tersebut mengalami penurunan intensitas dan menuju transisi ke fase stabilisasi kebijakan, sehingga tidak lagi menunjukkan eskalasi atau perubahan struktural yang relevan. Pembatasan hingga 2022 juga memungkinkan analisis yang fokus dan mendalam terhadap fase krisis, tanpa terbagi fokus dengan perkembangan jangka panjang yang bersifat administratif atau politis di tahun-tahun berikutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang isu perbatasan dan migrasi yang bisa diajukan sebagai rujukan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga peninjauan. Pertama tulisan yang membahas Diferensiasi kebijakan Polandia dalam menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi tahun 2019, kedua tulisan yang membahas Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa, ketiga tulisan yang membahas sekuritisasi migrasi Polandia Terhadap Pengungsi dalam Kerangka Keamanan: Studi Kasus Krisis Pengungsi Tahun 2015 dan 2022.

Pertama, penelitian dari Rizky Anandita, Fadia Ayunabila Safitri, Dasa Safitri, Rahmatul Amalia N. A. (2019) yang publish di journal of Airlangga University. Penelitian ini menganalisis signifikansi isu migrasi bagi negara-negara Uni Eropa yang mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan dari organisasi supranasional sebagai pendistribusian tanggung jawab penerimaan Migran dan pengungsi secara merata antara negara-negara anggota. Dalam penelitian ini memberikan beberapa kelebihan, yaitu; penelitian ini menyoroti lima faktor - lingkungan, budaya/identitas, pendidikan, asumsi *Trojan Horse*, dan ketidakpuasan lokal - sebagai variabel dalam kalkulasi kebijakan Polandia. Peneliti membedakan dengan jelas migran ekonomi (seperti Suriah dan Afghanistan), serta menunjukkan bagaimana respons pemerintah berbeda terhadap keduanya. Penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu studi ini lebih bersifat deskriptif daripada analisis teoritik. Tidak banyak dibahas kerangka seperti *securitization theory*, *differential inclusion*, atau *desecuritization*. Peneliti seolah menganggap masyarakat Polandia homogen dan seragam dalam penolakannya terhadap

pengungsi. Peneliti tidak membandingkan bagaimana migrasi Polandia berubah dari waktu ke waktu (Anandita et al. 2018).

Kedua, penelitian Mega Nisfa Makhroja (2020) yang publish di *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* (IJPSS). Penelitian ini menganalisis kasus Polandia dalam kontes sekuritisasi isu migrasi menggunakan sudut pandang *Copenhagen School* berdasarkan *Securitization Theory* karya Buzan (1998). Penelitian ini memberikan beberapa kelebihan yaitu; mengangkat kasus Polandia secara spesifik memberi kontribusi nyata bagi studi sekuritisasi yang biasanya didominasi oleh konteks barat seperti Perancis atau Inggris. Analisis berdasarkan *Copenhagen School* dan pemetaan lima elemen penting (*securitizing actor, speech act, existential threat, referent object, audience, functional actor*). Penelitian ini juga memberikan beberapa kekurangan, yaitu; migran hanya diposisikan sebagai objek ancaman, tanpa sudut pandang mereka terhadap kebijakan atau bagaimana mereka mengalami proses sekuritisasi, peneliti fokus pada sekuritisasi tetapi tidak banyak mengeksplor bagaimana resistensi sosial, kelompok advokasi, atau perubahan politik bisa menghasilkan proses de-sekuritisasi (Makhroja, 2020)

Ketiga, penelitian Alawi Ahmad Hamzofi (2023) yang merupakan karya akademik dari Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram. Penelitian ini menganalisis akar penyebab krisis kemanusiaan di perbatasan Belarus-Polandia tahun 2021 dengan menggunakan lensa Teori Migrasi Internasional *Push and Pull Factors* karya Everett Lee dan kerangka konseptual *Migration Security Nexus*. Studi ini memberikan beberapa kelebihan yaitu; memberikan analisis komprehensif yang menggabungkan faktor penyebab migrasi

berupa *push-pull* dan *intervening obstacles* dengan analisis sekuritisasi yang dilakukan oleh negara, sehingga menghubungkan dinamika kemanusiaan dengan realpolitik keamanan nasional. Penelitian juga secara rinci mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dialami pengungsi dari laporan *Human Rights Watch* serta mengungkap peran aktor ketiga seperti agen perjalanan Belarus. Namun, penelitian ini juga memberikan beberapa kekurangan, yaitu; analisis lebih banyak berfokus pada tindakan represif Polandia dan Belarus, tanpa secara mendalam membahas respons dan mekanisme lembaga-lembaga Uni Eropa (seperti Frontex atau Komisi Eropa) dalam menangani krisis di perbatasan eksternalnya. Selain itu, meskipun menggunakan konsep *Migration Security Nexus*, penelitian tidak secara eksplisit mengaitkan analisisnya dengan teori *The Securitization of Migrations* karya Phillipe Bourbeau (Hamzofi, 2023).

Dari beberapa penelitian diatas ditemukan satu kesamaan, yaitu sama-sama membahas permasalahan migran di Polandia. Peninjauan ini dilakukan guna memberikan kebaruan terhadap penelitian sebelumnya yaitu menggunakan sudut pandang the *Securitization of Migration* karya Phillipe Bourbeau (2011) menggunakan indikator kategori sekuritisasi migrasi *Institutional Indicators (Legal Component, Policy Statement, Saliency)* dan *Security Nexus (Interdiction dan Detention of Immigrants)* untuk menganalisis kebijakan yang ditetapkan pihak Polandia terhadap krisis migrasi yang terjadi di perbatasan Polandia memberikan pembaharuan perspektif dengan beberapa penelitian yang dijadikan rujukan.

1.6 Kerangka Pemikiran

The Securitization of Migration karya Phillipe Bourbeau (2011)

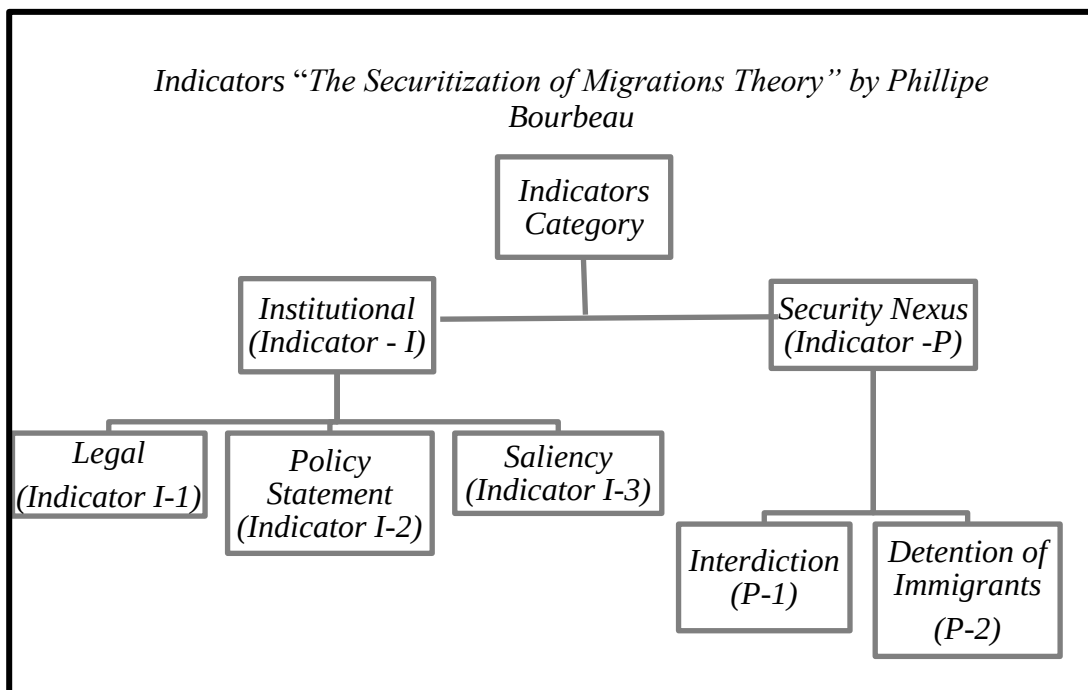
Dalam membantu proses penelitian, maka digunakan *The securitization of Migration* oleh Phillipe Bourbeau (2011) sebagai acuan penelitian. Migrasi adalah perpindahan penduduk melewati perbatasan negara atau seseorang yang tinggal diluar dari negara kelahiran atau diluar dari kewarganegaraannya dalam kurun waktu 12 bulan atau lebih (Bourbeau, 2011). Ini termasuk pencari suaka, pekerja migran asing, pelajar migran, pekerja perbatasan, dan denizen. Sekuritisasi memegang peran kunci dalam mencapai keamanan nasional suatu negara, yang dimana hal ini berkembang seiring dengan meningkatnya isu – isu migrasi dalam hubungan internasional yang kompleks yang dimana migran bisa menjadi bentuk ancaman untuk menekan suatu negara dengan adanya pelanggaran kebijakan migrasi. Sekuritisasi tidak hanya fokus kepada ancaman senjata atau perang, akan tetapi mendalami bagaimana migrasi menjadi isu keamanan, bukan karena sifatnya secara mengancam, tetapi karena dikonstruksi secara sosial dan politik sebagai ancaman yang fokus terhadap aspek perpindahan atau pergerakan internasional, yang mengecualikan “*Internally Displaced Persons (IDP)*” (Bourbeau 2011, 6).

Konsep ini melihat bagaimana perbedaan yang tepat antara migran ilegal dan legal atau migran dan pengungsi yang dimana perbedaan ini akan memberikan pemahaman terkait istilah “migrasi” dan dalam bukunya Phillipe Boubau menyatakan “*I contend that a security framework is not applied only to refugees but rather to the entire category of the movement of people*” (Bourbeau 2011, 6). Penentuan pendefinisian migran legal dan ilegal diatur oleh otoritas negara yang dimana tidak ada kordinasi multilateral antar negara, sehingga pemahaman tentang

migran yang dikategorikan legal dan ilegal tidak selalu sama disetiap negara. Oleh karena itu, konsep “migrasi” dan “keamanan” bersifat fleksible dapat dieksploitasi para politisi dan media “*Overdrawing an analytical distinction between several categories of migration would indeed miss the “flexibility” quality that politicians have been particularly eager to exploit.*” (Bourbeau 2011, 6).

Phillipe Bourbeau dalam buku “*The Securitization of Migrations*” memaparkan bahwa fenomena sekuritisasi migrasi dapat dijelaskan ke dalam dua kategori indikator, yaitu: 1. *Institutional Indicators (Indicator - I)*, 2. *Migration Security Nexus (Indicator - P)* (Bourbeau 2011).

**Bagan 1. Indicators “*The Securitization of Migrations Theory*” by
Phillipe Bourbeau**



(Sumber: Bourbeau 2011)

Pada kategori indikator pertama, yaitu indikator institusional (Indikator - I) memiliki tiga sub indikator, yaitu;

1. *Legal Component*, yaitu mencatat undang-undang migrasi paling penting serta ketentuan yang menghubungkan migrasi dengan isu keamanan (indikator I-1).
2. *Policy Statement*, yaitu mengeksplorasi apakah migrasi tercantum sebagai isu keamanan dalam pernyataan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan, urusan luar negeri, dan migrasi (indikator I-2).
3. *Saliency*, yaitu pengukuran tingkat urgensi atau penonjolan isu dalam kebijakan publik (indikator I-3).

Kategori kedua dari indikator migrasi yang disekuritisasi berkaitan dengan praktik keamanan yang berhubungan dengan hubungan antara migrasi dan keamanan, yaitu *Security Nexus* (indikator P). Dua kebijakan atau praktik yang relevan adalah:

1. Intersepsi (*Interdiction*) (P-1), pencegahan migrasi sebelum mencapai wilayah negara tujuan.
2. Penahanan Migran (*Detention of Immigrants*) (P-2), penahanan administratif terhadap migran yang telah mencapai wilayah negara tujuan sebagai bentuk kontrol keamanan.

Dalam menerapkan konsep dari Phillipe Bourbeau (2011) dalam upaya yang dilakukan oleh Polandia sebagai upaya untuk melihat bagaimana konstruksi sekuritisasi terhadap migran yang dianggap sebagai ancaman dengan menganalisis

realisasi regulasi keamanan, *framing* pernyataan pemerintah, pengukuran atau survey sample media lokal dan bentuk pencegahan baik sebelum atau sesudah memasuki Polandia serta penahanan migran yang dilakukan dalam upaya sekuritisasi migrasi yang dilakukan pemerintah Polandia tahun 2021 - 2022.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini berdasarkan pada teori “*The Securitization of Migration*” karya Philippe Bourbeau dengan melihat bagaimana Polandia menerapkan kebijakan sekuritisasi terhadap migran Timur Tengah yang didominasi oleh migran Iraq dan Syria di perbatasan Polandia–Belarusia pada tahun 2021–2022 karena negara memandang lonjakan migran tersebut sebuah ancaman nasional yang dimana menimbulkan kerugian finansial untuk pembiayaan infrastruktur perbatasan, operasi pertahanan, dan bantuan kemanusiaan sebesar €1.5 - €2 miliar yang membebani bagian Provinsi Timur Polandia, infrastruktur lokal, dan pelayanan kesehatan. Persepsi ancaman ini mendorong realisasi sekuritisasi migrasi terkait pengesahan atau pemberlakuan kebijakan khusus (*Legal Component*) *State of Emergency Regulation, Amendment to the ACT on Foreigners, Polish Border Guard ACT*. Pernyataan pemerintah atau pejabat yang menegaskan migran di perbatasan Polandia Belarusia sebagai ilegal migran yang memberikan risiko eksistensial bagi stabilitas nasional (*Policy Statement*). Serta dominasi pemberitaan media lokal yang menempatkan migrasi di puncak agenda keamanan (*Saliency*) berdasarkan rata-rata framing media online Polandia pemberitaan fenomena migrasi ini membentuk narasi ancaman dan disekuritisasi berkaitan dengan praktik keamanan yang berhubungan dengan hubungan antara migrasi dan keamanan,

Intersepsi (*Interdiction*) pencegahan migrasi sebelum dan sesudah mencapai wilayah negara tujuan dalam bentuk infrastruktur keamanan, militerisasi atau *pushback*. sedangkan, penahanan Migran (*Detention of Immigrants*) penahanan administratif terhadap migran yang telah berhasil melewati perbatasan wilayah negara tujuan sebagai bentuk kontrol keamanan.

Dengan demikian, kebijakan Polandia yang diberlakukan ketika isu ini terjadi tidak lahir dari kebutuhan administratif, melainkan strategi politik yang menggunakan keamanan untuk melegitimasi pembatasan terhadap kelompok migran tertentu. Teori Bourbeau memungkinkan analisis terhadap bagaimana negara membentuk dan menginstitusikan ancaman, serta bagaimana migrasi menjadi bagian dari proses sekuritisasi yang terstruktur.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan adanya sebuah pondasi yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan kemudahan dalam membentuk argumen guna memperdalam permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat menentukan hipotesis dalam penelitian.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan subjek tingkatan meso, yang dimana negara menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini mengangkat Polandia

sebagai subjek yang dimana peneliti akan memaparkan penulisan melalui perspektif Polandia sebagai subjek utama yang memberlakukan sekuritisasi migrasi terhadap penerimaan Migran Timur Tengah

Penelitian ini memfokuskan objek penelitian pada sekuritisasi migrasi Polandia berdasarkan *Legal Component, Policy Statement, Saliency, Interdiction, Detention of Migrations* terhadap migran Timur Tengah.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian diperoleh menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang dimana peneliti memanfaatkan instrumen studi pustaka berupa buku, jurnal, artikel, website.

1.8.5 Proses Penelitian

Pertama, pendahuluan yang dimana peneliti melakukan pengamatan mengenai isu migrasi yang terjadi di perbatasan Polandia. Dari hasil pengamatan pihak Polandia melakukan kebijakan sekuritisasi migrasi terhadap arus migran Timur Tengah

Kedua, studi pustaka yang berisi referensi dan teori yang dibutuhkan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Sumber dalam penelitian berasal dari situs-situs internet, dan jurnal yang berkaitan dengan isu migrasi yang terjadi di Polandia.

Ketiga, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting, karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian akan

ditujukan. Perumusan masalah pada hakikatnya merupakan perumusan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian.

Keempat, pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder berupa Sumber dalam penelitian berasal dari situs-situs internet, dan jurnal yang berkaitan dengan isu migrasi yang terjadi di perbatasan Polandia-Belarusia.

Kelima, pengolahan data. Pengolahan data ini bertujuan agar data yang telah diperoleh dapat dianalisa yang kemudian akan memudahkan mengambil kesimpulan atau menghasilkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

Keenam, analisa data. Data hasil pengolahan data akan dianalisis lebih lanjut yang dimana akan dilakukan analisa yang bertujuan untuk mempelajari isu yang ada dan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Ketujuh, Kesimpulan dan Saran. Dari hasil yang telah diperoleh dan dianalisis, maka kesimpulan dan saran yang diberikan dapat kiranya sebagai masukan kepada pihak lain yang melakukan penelitian serupa atau pihak yang membutuhkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam IV BAB Pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan penelitian, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dinamika dan Masalah Migran Timur Tengah di Polandia

Bab ini berisikan penjabaran permasalahan dinamika Migran Timur - Tengah ke Polandia

BAB III: Sekuritisasi Migrasi Polandia Tahun 2021-2022

Bab ini berisikan analisis terkait kebijakan represif Polandia terhadap Migran Timur Tengah, data yang akan dibahas berdasarkan analisis kebijakan Polandia terhadap Migran Timur Tengah sebagai sekuritisasi nasional yang berbasis pada konsep “*The Securitization of Migrations*” karya Philippe Bourbeau (2011) dalam dua kategori indikator, *institutional indicators* (Indicator - I) dan *Migration Security Nexus* (Indicator - P)

BAB IV: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan adapun saran yaitu memuat rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

DINAMIKA MIGRAN ILEGAL IRAK SURIAH DI PERBATASAN POLANDIA BELARUSIA

Fenomena gelombang migrasi irregular terjadi melewati *eastern land border* berdasarkan data *Frontex Annual Risk Analysis* merupakan angka tertinggi sejak migrasi global pasca-krisis Suriah. Pada tahun 2021 dengan jumlah total migran yang melakukan penyeberangan perbatasan ilegal mencapai 200.000. Gelombang migrasi ilegal di *eastern Border land* Uni Eropa (melalui Belarusia menyebrangi perbatasan Polandia) merupakan bentuk penyebrangan kontroversial yang dimana migran memasuki Belarusia dengan jalur resmi namun akan menyebrangi perbatasan Polandia dengan jalur tidak resmi. Pada bab ini akan membahas lebih lanjut dinamika, krisis, dan dampak yang diakibatkan gelombang migrasi irregular menyebrangi perbatasan Polandia Belarusia.

2.1 Dinamika Gelombang Migrasi Migran Ilegal ke Polandia tahun 2021 – 2022

Perbatasan timur Polandia yang berbatasan langsung dengan Belarusia menjadi episentrum dari krisis migrasi yang kompleks dan berlapis. Ribuan migran khususnya Irak dan Suriah tiba di Belarusia secara legal dengan visa turis lalu bergerak menuju Polandia secara ilegal sebagai pintu masuk ke Uni Eropa. Fenomena ini bukanlah peristiwa baru, melainkan kelanjutan dari dinamika migrasi global pasca-krisis Suriah 2015 (Zdanowicz 2023).

**Gambar 5. Peta Rute Migrasi Migran Timur Tengah Melalui Turki
Menyebrangi Greece tahun 2015**



(Sumber: Vox Youtube, 2021)

Fenomena migrasi tahun 2015 ini menjadi gelombang migrasi ekstrem pertama diluar perkiraan Uni Eropa, sehingga diberlakukan pengetatan penjagaan dengan membuat perjanjian dengan beberapa negara non Uni Eropa (Morocco, Tunisia, Libya, Egypt, Jordan, Turkey, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Moldova) yang berbatasan dengan wilayah Uni Eropa untuk menahan gelombang migran dan melakukan *push back* dengan intensive sebesar €6 miliar.

Fenomena *migration crisis* selanjutnya terjadi pada pertengahan tahun 2021 setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi ke empat kepada Belarusia, berupa pembatasan sumber pendapatan utama Belarusia dan Pelarangan penerbangan dari Belarusia melintasi wilayah UE, setelah Belarusia membelokan penerbangan Ryanair FR 4978 yang dalam perjalanan dari Athena ke Vilnius mendarat darurat di Minsk dengan menggunakan ancaman bom palsu. Hal ini diberlakukan untuk menangkap Raman Pratasevich, seorang jurnalis dan aktivis oposisi yang berada di dalam pesawat tersebut (Woolfson, 2021).

Menanggapi keputusan sanksi tersebut di tahun 2021, Belarusia memanfaatkan kebijakan Uni Eropa yang melakukan pembatasan migran dengan membayar beberapa negara non Eropa yang berbatasan langsung dengan Uni Eropa yang memungkinkan menjadi jalur transit migrasi migran ilegal, untuk memberikan tekanan terhadap Uni Eropa untuk menghentikan sanksi ke-empat yang dijatuhkan kepada Belarusia. Belarusia berusaha menarik migran Timur Tengah untuk memasuki kawasan Uni Eropa dengan memberikan kelonggaran visa dan promosi tur wisata ke Belarusia yang menjanjikan akses mudah memasuki Uni Eropa (Korte & de la Baume, 2021).

Berdasarkan data Council Implementing Regulation (EU) 2021/2024 of 2 December 2021, implementing Article 8a (1) of regulation (EC) no 765/2006 concerning measures in respect of Belarus terkait pemberian sanksi tambahan terkait dugaan mengorganisir atau membantu kegiatan penyeberangan ilegal migran ke perbatasan Uni Eropa,

“In its Decision (CFSP) 2021/1990 of 15 November 2021, the Council amended the designation criteria in its Decision 2012/642/CFSP to allow for the application of targeted restrictive measures against natural or legal persons, entities or bodies organising or contributing to activities by the Lukashenko regime that facilitate the illegal crossing of the external borders of the Union or the transfer of prohibited goods and the illegal transfer of restricted goods, including hazardous goods, into the territory of a Member State.” (Official Journal of the European Union Article (3), 2021)

berikut beberapa tabel berdasarkan *Official Journal of the European Union Annex I to regulation (EC) no 76/2006 is amended legal person, entities and bodies referred to in Article 2(1)* menjelaskan bukti keterkaitan Belarusia terhadap gelombang migrasi yang terjadi di tahun 2021, sebagai berikut;

Tabel 3. Open Joint Stock Company “Belavia Belarusian Airlines” - (AAT «Авіакомпанія «Белавія» or АО «Белавия Авиалайнс»)

Identifying Information	Reasons for Listing	Date of Listing
Address: 14A Nemiga St., Belarus, 220004 Date of Registration: 4.1.1996 Registration Number: 600390798	<i>Open Joint Stock Company "Belavia" is the State-owned national flag carrier airline. Aliaksandr Lukashenka promised that his administration would provide all possible support to Belavia after the Union decided to introduce a prohibition on the overflight of Union airspace and on access to Union airports by all Belarusian air carriers. To that end, he agreed with the Russian President Vladimir Putin on planning the opening of new airline routes for Belavia.</i> <i>Belavia has been involved in bringing migrants from the Middle East to Belarus. Migrants wishing to cross the Union's external border have been flying to Minsk on</i>	2.12.2021

	<i>board flights operated by Belavia from a number of Middle Eastern countries, in particular Lebanon, UAE and Turkey. In order to facilitate this, Belavia opened new air routes and expanded the number of flights on existing routes. Local tour operators have acted as intermediaries in selling Belavia tickets to prospective migrants, thereby helping Belavia to keep a low profile.</i>	
--	--	--

(**Sumber:** Official Journal of the European Union (EU) Council Implementing Regulation, 2021/2024)

Tabel 4. Republican Unitary Enterprise “TSENTRKURORT” -

Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства "ЦЭНТРКУРОРТ"

Identifying Information	Reasons for Listing	Date of Listing
Address: 39 Myasnikova ST., Minsk, Belarus, 20030 Date of Registration: 12.8.2003 Registration Number: 100726604	<i>State-owned tourism company Tsentrkurort is part of the Department of Presidential Affairs of Belarus. Tsentrkurort is reported to be one of the companies coordinating the flow of migrants that intend to cross the border between Belarus and Union Member States. Tsentrkurort helped at least 51 Iraqi citizens acquire visas for their visit to Belarus, and signed a contract for transportation services with Belarusian company Stroitur, which offers bus rentals with drivers. Buses booked by Tsentrkurort transported migrants, including children, from Minsk airport to hotels.</i>	2.12.2021

(**Sumber:** Official Journal of the European Union (EU) Council Implementing Regulation, 2021/2024)

Tabel 5. LLC Oskartour - ООО Оскартур

Identifying Information	Reasons for Listing	Date of Listing
Address: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk, Belarus Date of registration: 18.10.2016 Registration Number: 192721937	<i>Oskartur is a tour operator, which facilitated the obtainment of visas for migrants coming from Iraq and organised their subsequent travel to Belarus by flights from Baghdad to Minsk. Those Iraqi migrants were later transported to the Belarusian Union border with the aim to illegally cross it. Oskartur and its contacts with Iraqi airlines, Belarusian authorities and the State-owned Tsentrukort company, regular flights from Baghdad to Minsk were launched by the Iraqi air carrier, in order to bring more persons to Belarus to illegally cross the external borders of the Union. Oskartur took part in this illegal border-crossing scheme carried out by Belarusian security services and State-owned companies.</i>	2.12.2021

(**Sumber:** Official Journal of the European Union (EU) Council Implementing Regulation, 2021/2024)

**Tabel 6. Republican Subsidiary Unitary Enterprise “Hotel Minsk” - Гатэль
«МИНСК Республиканское дочернее унитарное предприятие «ОТЕЛЬ
«МИНСК»**

Identifying Information	Reasons for Listing	Date of Listing
Address: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Belarus Tel: +375 (17) 209-90-61 Fax: +375 (17) 200-00-72 Email: hotelminsk@udp.gov.by marketing@hotelminsk.by Website: http://hotelminsk.by/ Date of Registration: 26.12.2016 / 3.4.2017 Registration Number: 192750964	<i>Hotel Minsk is a subsidiary company of the Belarus President Property Management Directorate, a government agency that directly reports to the President. Hotel Minsk took part in the illegal border-crossing scheme carried out by Belarusian security services and State-owned companies. Migrants were accommodated in the hotel before being transported to the border between Belarus and Union Member States in order to illegally cross it. Iraqi migrants had listed Hotel Minsk as a temporary residence in their Belarusian visa applications, which were lodged immediately before their arrival to Belarus.</i>	2.12.2021

(**Sumber:** Official Journal of the European Union (EU) Council Implementing Regulation, 2021/2024)

**Tabel 7. Open Joint Stock Company “Hotel PLANETA” – ААТ
«ГАСЦІНІЦА ПЛАНЕТА» ОАО «ГОСТИНИЦА ПЛАНЕТА»**

Identifying Information	Reasons for Listing	Date of Listing
Address: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Belarus Tel: +375 (17) 226-78-53 Fax: +375 (17) 226-78-55 Email: planeta@udp.gov.by Website: https://hotelplaneta.by/ Date of Registration: 1.2.1994/ 6.3.2000 Registration Number: 100135173	<i>Hotel Planeta is a subsidiary company of the Belarus President Property Management Directorate, a government agency that directly reports to the President. Hotel Planeta took part in the illegal border-crossing scheme carried out by Belarusian security services and State-owned companies. Migrants were accommodated in the hotel before being transported to the border between Belarus and Union Member States in order to illegally cross it. They paid USD 1000 to a travel agent in Baghdad for the flight, a tourist visa and a stay in the hotel.</i>	2.12.2021

(Sumber: Official Journal of the European Union (EU) Council Implementing Regulation, 2021/2024)

Tabel 8. ASAM (Asobnaia Sluzhba Aktyunyunykh Merapryemstvau) -

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Identifying Information	Reasons for Listing	Date of Listing
Address: State Border Committee of the Republic of Belarus, 24 Volodarsky St., 2200550, Minsk, Belarus	<i>ASAM (Separate Service for Active Measures) is a Belarusian special border guard unit controlled by Viktor Lukashenka and headed by Ihar Kruchkou. ASAM forces under special operation "Gate" organise illegal border crossings through Belarus to Union Member States and are directly involved in the physical transportation of migrants to the other side of the border. ASAM additionally charges the transported migrants for the border crossing.</i>	2.12.2021

(**Sumber:** Official Journal of the European Union (EU) Council Implementing Regulation, 2021/2024)

Tabel 9. Cham Wings Airlines

Identifying Information	Reasons for Listing	Date of Listing
Address: P.O. Box 30588 Damascus, Syria Website: https://chamwings.com/	<i>Cham Wings Airlines is an operator of charter flights from Syria to Belarus. The company increased the number of flights from Damascus to Minsk since the summer of 2021 in order to transport migrants to Belarus, who intended to illegally cross the external borders of the Union. In autumn 2021, Cham Wings also opened two new offices in Minsk in order to be able to organise the flights between Damascus and Minsk.</i>	2.12.2021

(**Sumber:** Official Journal of the European Union (EU) Council Implementing Regulation, 2021/2024)

Tabel 10. VIP Grub

Identifying Information	Reasons for Listing	Date of Listing
Address: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul, Turkey	<i>VIP Grub is a passport and visa service based in Istanbul, Turkey, which organises trips to Belarus with the explicit intention of facilitating migration to the Union. VIP Grub actively advertises migration to the Union.</i>	2.12.2021

(**Sumber:** Official Journal of the European Union (EU) Council Implementing Regulation, 2021/2024)

Data tabel 3 – 10 diatas menyatakan bagaimana keterlibatan Belarusia dalam gelombang *irregular migration* yang terjadi di tahun 2021 dan hal ini menjadi keputusan diterbitkannya Council Implementing Regulation (EU) 2021/2024 of 2 December 2021, implementing Article 8a (1) of regulation (EC) no 765/2006 yang diajukan kepada Dewan Presiden the Council of the European union J. Vrtovec, di Brussel pada 2 Desember 2021.

Berdasarkan data *the Border Guard of Poland* di akhir tahun 2021, mencatat 39.697 migran mencoba menyeberangi perbatasan Polandia melalui Belarusia. Lonjakan ekstrem dari mayoritas populasi berasal dari negara Timur Tengah secara ilegal, yang mayoritas berasal dari Irak dan diikuti kewarganegaraan Syria yang memperoleh “*group tourist visas*” Belarusia. Berikut penyebaran promosi

beberapa agen travel untuk menuju Belarusia yang menyebar di media social Facebook.

Gambar 6. Promosi Tur Wisata Ke Belarusia di Media Sosial Facebook

Nippur Gate Travel & Tourism **السجاعة والسجاعة** **ikuti**
27 Juli 2021

#رحلة **#أياي** **#إلى** **#بيلاروسيا** **#الاوربية**
✈️ **برنامج** **بيلاروسيا** ✈️ **8 أيام 7 ليالي**
✈️ **أقرب رحلة** **متوفرة** **5-8-2021 الخميس**
✈️ **رحلاتنا** **كل خميس**
✈️ **تبدأ** **السفر** **من \$700**

السعر **يشمل :-**
✈️ **فيزا** **بالجواز** **سكنر** **من** **بغداد**
✈️ **ذكر** **طيران** **ذهاب** **وعودة**
✈️ **وجبات** **الافطار**
✈️ **فنادق** **بالسنة** **3,4,5 نجوم**
✈️ **جولات** **سياحية**
✈️ **في** **اليوم** **الأخير** **من** **البرنامج** **4 نجوم و 5 نجوم** **الانتقال** **بالقائمة** **في** **منتج**
✈️ **روستون** **المنزل** **على** **خروج** **الحب** **جيت** **الهدوء** **والاستجمام**
✈️ **رحلة** **خاصة** **بشركة** **نواية** **تيور** **للسفر** **والسياحة**
✈️ **تنطلق** **الرحلة** **من** **مطار** **بغداد** **الدولي** **على**
✈️ **طيران** **#الاذلي** **بغداد** **والقرا** **سكنر** **بجواز** **من** **بغداد** **من** **ضمن** **السعر** **وقضاء**
✈️ **اجمل** **8 أيام** **في** **فنادق** **راقية** **وسط** **مدينة** **سكنر** **مع** **الإفطار** **وجولات** **سياحية**
✈️ **مميزة** **من** **ضمن** **البرنامج** **تضمن** **جولة** **في** **مدينة** **سكنر** **الجميلة** **العرف** **على**
✈️ **عاصمة** **بيلاروسيا** **البيلسا** **وزارة** **اجمل** **العمال** **السياحية** **في** **العينة** **وزارة** **الغربة**
✈️ **الفتكورية** **#بودوتكي** **للتعرف** **على** **الحياة** **واللهن** **البيلاروسية** **القديمة** **وتذوق**
✈️ **متجاولهم** **والذهاب** **إلى** **#سليتشي** **والتمتع** **بعض** **التفرات** **والذهاب** **إلى**
✈️ **البحيرات** **المحلاة** **والمرج** **الخصي** **وبعدما** **الذهاب** **إلى** **جزيرة** **على** **شكل** **قلب**
✈️ **لنسى** **جزيرة** **الحب** **وسط** **البحيرة** **والتمتع** **بجمل** **شوا** **وبعدما** **الذهاب** **إلى** **منتج**
✈️ **#سولو** **وروكب** **الغوارب** **والغناط** **الصور** .
✈️ **وانتظاركم** **دائما** **■**
✈️ **للحجز** **والاستفسار**
✈️ **بغداد** **-** **زينة** **-** **قناطع** **جسر** **الزيمبي** **-** **مجمع** **استمبول**
07808441111
07725099990
Email : info@nippurgate.com
✈️ **وفات** **الدوام** **من** **9 صباحا** **لغاية** **10 مساء**
✈️ **ويمكنكم** **الحجز** **من** **طريق** **الحواله**
✈️ **#رحلة** **#أياي** **#إلى** **#بيلاروسيا** **#الاوربية**
✈️ **Program** **Belarus** **8 hari 7 malam**
✈️ **Penerbangan** **terdekat** **tersedia** **5-8-2021** **Kamis**
✈️ **Perjalanan** **kami** **setiap** **Kamis**
✈️ **Harga** **mulai** **dari** **\$700**
✈️ **Harga** **sudah** **termasuk** **:-**
✈️ **Visa** **paspor** **akan** **diblokir** **dari** **Bagdad** ✈️
✈️ **Tiket** **pesawat** **sebaliknya**
✈️ **Makanan** **sarapan** **pagi**
✈️ **Hotel** **Balcenter** **bintang** **3, 4, 5** ✈️
✈️ **Tur** **wisata** **wisata**
✈️ **Hari** **terakhir** **menginap** **sementara** **bintang** **4** **dan** **bintang** **5** **di**
✈️ **Robinson's** **Overlooking** **Love** **Island** **Resort** **di** **mana**
✈️ **ketenangan** **dan** **relaksasi**
✈️ **Perjalanan** **Pribadi** **oleh** **Nibor** **Gerbang** **Perjalanan** **&**
✈️ **Pariwisata**
✈️ **Penerbangan** **berangkat** **dari** **Bandara** **Internasional** **Bagdad**
✈️ **pada**
✈️ **Penerbangan** **#Fly** **Baghdad** **dan** **Visa** **akan** **menutupi** **paspor**
✈️ **Anda** **dari** **Baghdad** **termasuk** **dalam** **harga** **dan** **menghabiskan**
✈️ **8 hari** **terindah** **di** **hotel** **hotel** **mewah** **di** **pusat** **kota** **Mensk**
✈️ **dengan** **sarapan** **dan** **tur** **wisata** **husus** . **Program** **ini** **meliputi**
✈️ **wisata** **kota** **Mensk** **yang** **indah** **untuk** **mengenal** **ibu** **kota** **putih**
✈️ **Belarus** , **mengunjungi** **tempat** **wisata** **terindah** **di** **kota** **dan**
✈️ **mengunjungi** **kampung** **cerita** **rakyat** **#Dodotki** **untuk**
✈️ **mengenal** **Anda** **harus** **menikmati** **hidup** **dan** **profesi** **orang** **tua**
✈️ **Belarusia** , **cicipi** **produk** **merek** , **pergi** **ke** **#Slichy** , **nikmati**
✈️ **memanjat** **TV** , **pergi** **ke** **danau** **yang** **indah** **dan** **tangga** **kayu** ,
✈️ **lalu** **pergi** **ke** **pulau** **berbentuk** **hati** **bernama** **#Love** **Island** **di**
✈️ **tengah** **danau** , **nikmati** **berbebug** , **lalu** **pergi** **ke** **resor** **# Solo** ,
✈️ **naik** **perahu** **dan** **naik** **Foto-foto** .
✈️ **Selalu** **menunggu** **mu** **■** **■**
✈️ **Untuk** **pemesanan** **dan** **pertanyaan**
✈️ **Bagdad** **-** **Zion** **-** **Persimpangan** **Jembatan** **Musim** **Semi** **-**
✈️ **Kompleks** **Istanbul**
07808441111
07725099990
Email : info@nippurgate.com
✈️ **Jam** **kerja** **dari** **jam** **9 pagi** **sampai** **10 malam**
✈️ **Dan** **Anda** **dapat** **memesan** **melaui** **transfer**
✈️ **Sembunyikan** **Terjemahan** **-** **Beri** **Peringkat** **Terjemahan** **ini**

Boky darya Company
19 Oktober 2021

فيزا بيلاروسيا من شركة بوكي داريا
سعر مميز وأسعار خاصة للمكاتب
سرعة بالإنجاز
يتضمن الفيزا تذكرة السفر + حجز فندق + تأمين صحي + استقبال
للمزيد من المعلومات التواصل على الأرقام التالية

07504747901
07502165656
07502863000

دوسايد نوروز بجانب زيرفاني
#أربيل #كرديستان #سياحة #العراق #بغداد #مكاتب_السياحية #سوريا
#بوكي_داريا #فيزا_بيلاروسيا #مينيسك

Visa Belarus dari perusahaan Boki Daria
Harga spesial dan harga spesial untuk kantor
Berebut untuk mencapai
Sudah termasuk visa + tiket perjalanan + reservasi hotel +
asuransi kesehatan + penerimaan
Info lebih lanjut hubungi nomor berikut
07504747901
07502165656
07502863000
Duside Nowruz di samping Zirvani
#أربيل #كرديستان #سياحة #العراق #بغداد #مكاتب_السياحية #سوريا
#بوكي_داريا #فيزا_بيلاروسيا #مينيسك
Sembunyikan Terjemahan · Beri Peringkat Terjemahan Ini

BOKYDARYA COMPANY

BEARUS VISA
ALL IN ONE

+964 (750) 474 7901
BOOK NOW
BOKYDARYA COMPANY

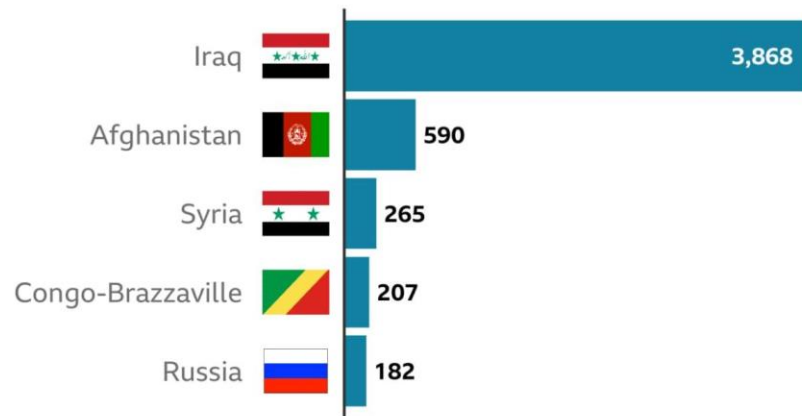
(Sumber: Facebook, 2021)

Promosi Paket wisata ke Belarusia yang tersebar luas di jejaring media sosial Facebook di tahun 2021.

**Gambar 7. Data Migran Ilegal yang menyeberangi EU's Eastern
Land Border**

Iraqis are the biggest group of migrants

Number of illegal crossings on the EU's eastern land borders by nationality, January to October 2021



(Sumber: Frontex, 2022)

Data migran ilegal di atas hanyalah bagian dari data migran yang terdeteksi oleh Frontex Risk Analysis Published Report 2021/2022. Data dari EU's border force, Frontex menunjukkan bahwa negara asal utama para migran adalah Irak.

Promosi yang ditargetkan melalui media sosial seperti Facebook secara efektif mengubah prosedur visa resmi menjadi alat untuk merekrut migran, di mana visa yang seharusnya untuk tujuan turis di salah gunakan sebagai tiket masuk pertama dalam perjalanan. Laporan menunjukkan bahwa otoritas Belarusia secara sengaja memberikan visa *multi-entry* yang memungkinkan perjalanan berulang bagi calon migran, sebuah kebijakan yang kontras dengan praktik normal untuk turis biasa (OSCE, 2022).

Gambar 8. Promosi Pembuatan Visa Mudah ke Belarusia di Media Sosial

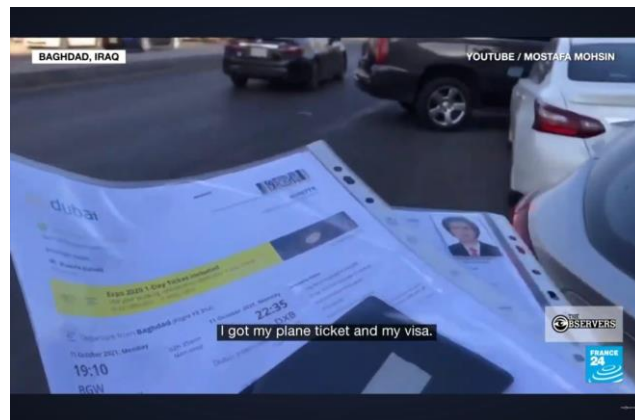
Facebook



(Sumber: Facebook, 2021)

Promosi visa yang tersebar di media sosial Facebook oleh agen migrasi atau agen travel Irak pada Oktober 2021 menargetkan warga negara Irak yang ingin bermigrasi ke wilayah Eropa untuk kesempatan hidup yang lebih baik.

Gambar 9. Migran Irak mendapatkan Visa dan Tiket Pesawat dari Baghdad Menuju Dubai



(Sumber: The France 24 English Youtube, 2021)

Report berdasarkan Youtube pribadi Mostafa Mohsin, migran Irak yang membagikan pengalaman pribadinya memasuki Uni Eropa bersama teman-temannya dan migran lainnya, mendapatkan visa dan tiket dari *travel agency* pesawat transit Baghdad menuju Dubai menuju Minsk.

Gambar 10. Transit Dubai Airport menuju Minsk Airport



(Sumber: The France 24 English Youtube, 2021)

Rute transit Mostafa Mohsin dan temannya dari Dubai menuju Minsk Airport.

Berdasarkan data Reuters (2021), dengan lebih dari 30 narasumber migran atau yang akan menjadi migran dari Timur Tengah di perbatasan Belarusia Polandia. Tercatat sekitar 20 orang mengatakan bahwa visa yang mereka gunakan merupakan visa tujuan wisata menuju Belarusia. Dokumen yang dirilis oleh Polandia menunjukkan hampir 200 warga Irak menerima dukungan visa dari perusahaan perjalanan milik negara di Belarusia untuk perjalanan lainnya. Para migran Irak mengatakan mereka menghabiskan sekitar \$1.250 dan \$4.000 tiket pesawat untuk mencapai Minsk menggunakan penerbangan komersil (Reuters, 2021). Banyak diantaranya terbang dengan *Belavia Airline* yaitu pesawat nasional Belarusia dari Istanbul, Beirut dan Dubai.

Berdasarkan wawancara The France 24 english dengan narasumber kewarganegaraan Irak di perbatasan Belarusia Polandia, setiap migran diharuskan membayar \$6.000 sampai \$7.000 untuk visa mereka (The France 24 English, 2021). Setibanya di Belarusia, mereka akan diarahkan ke perbatasan Belarusia Polandia.

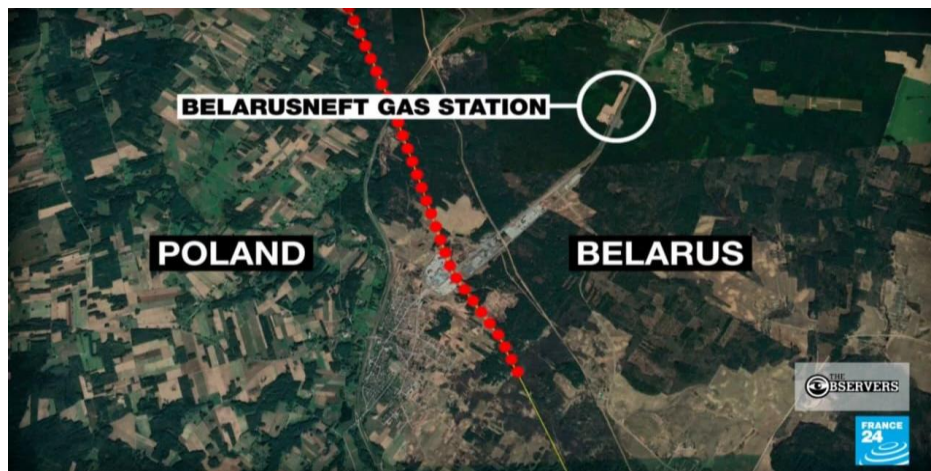
Gambar 11. Penyebaran Informasi Titik Kumpul Migran ke Perbatasan Polandia di Sosial Media Facebook



(Sumber: The France 24 English Youtube, 2021)

Penyebaran informasi terkait titik kumpul para migran di perbatasan Polandia Belarusia di media sosial Facebook yang ditunjukkan kepada para migran.

Gambar 12. Lokasi Titik Kumpul Migran di Belarusneft Gas Station Belarusia



(Sumber: The France 24 English Youtube, 2021)

Lokasi titik kumpul migran ilegal di perbatasan Belarusia Polandia yang tersebar di media sosial Facebook.

Puncak krisis migrasi terjadi pada bulan Oktober 2021, ketika total 17.447 percobaan ilegal tercatat dan mengalami penurunan secara signifikan pada bulan November sebanyak 8.917 dan Desember sebanyak 1.740 penurunan percobaan penyeberangan ilegal melalui perbatasan Polandia Belarusia.

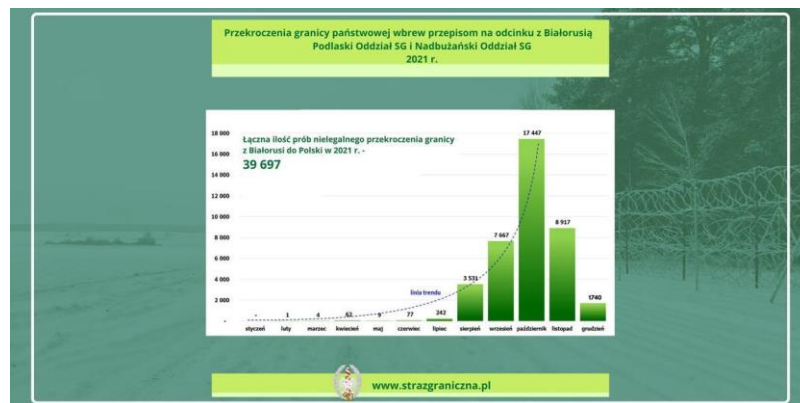
Gambar 13. Crossing the State Border in Violation of Regulations in the Years 2018 – 2021, on the Section with Belarusia



(Sumber: Straż Graniczna, 2022)

Data tersebut merupakan statistik data migran yang dapat ditemukan dan tercatat Straz Graficzna. Pada tahun 2021 terlihat lonjakan ekstrem sebanyak 39.697 migran ilegal melintasi perbatasan Polandia Belarusia.

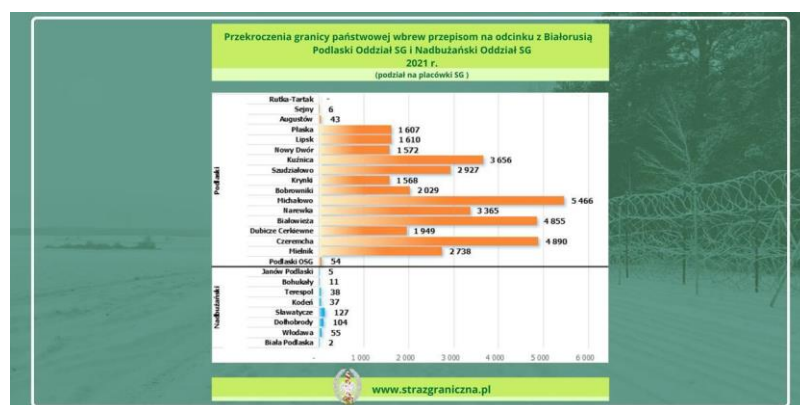
Gambar 13. Melintasi Perbatasan Negara Secara Melanggar Peraturan, di bagian Perbatasan dengan Belarusia, Dirinci Berdasarkan Bulan



(Sumber: Straż Graniczna, 2022)

Data tersebut merupakan statistik data migran ilegal yang dapat ditemukan dan tercatat Straż Graniczna. Pada Bulan Oktober menjadi puncak tertingginya sebanyak 17.447 migran ilegal di perbatasan Polandia Belarusia.

Gambar 14. Melintasi Perbatasan Negara Secara Melanggar Peraturan, Di Bagian Perbatasan dengan Belarusia, Sesuai dengan Pembagian Pos Penjaga Perbatasan



(Sumber: Straż Graniczna, 2022)

Berdasarkan data-data diatas dalam fenomena ini, pos penjaga perbatasan di Michałów yang menghadapi tekanan migrasi terbesar sebanyak 5.466 upaya penyebrangan, diikuti sejumlah upaya besar lainnya di pos penjaga perbatasan

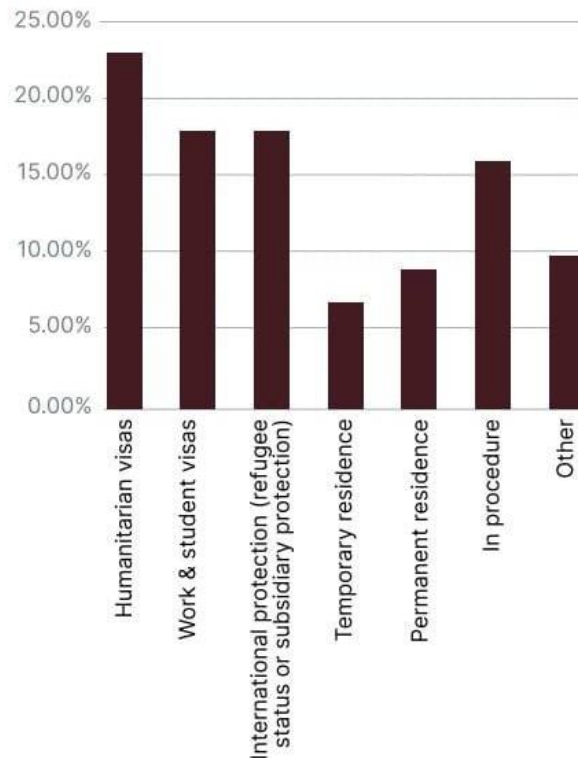
Mielnik sebanyak 4.890 dan pos penjaga perbatasan di Białowieża sebanyak 4.855 migran ilegal. Krisis ini menimbulkan dampak multidimensional (keamanan, sosial budaya, dan ekonomi).

Tahun 2022 mencatat jumlah migran ilegal yang tetap tinggi, yakni sekitar 7.000 hingga 8.000 orang. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya gelombang migrasi di masa ini lebih terkendali setelah pemberlakuan sekuritisasi migrasi, pemerintah Polandia mulai mengambil langkah lebih strategis untuk mengendalikan aliran migrasi. Di antaranya adalah pembangunan pagar perbatasan permanen, pemberlakuan zona larangan akses di wilayah perbatasan, dan kerja sama dengan Uni Eropa untuk mendepolitisasi isu migrasi dan memperkuat pengawasan lintas wilayah (Anandita et al. 2022).

2.2 Krisis Migran Timur Tengah ke Polandia Tahun 2021-2022

Fenomena *migration crisis* di perbatasan Polandia Belarusia, warga negara Irak, dan Suriah yang bermigrasi ke wilayah Belarusia menuju perbatasan Polandia dikategorikan sebagai migran bukan sebagai *asylum seekers* atau *refugees*, hal ini dikarenakan pergerakan migrasi yang tidak melalui jalur pengungsi regular sesuai hukum internasional.

Grafik 2. Type of Legal Status of Migrants to Poland



(Sumber: Eastern European Studies Center (EESC), 2022)

Grafik diatas merupakan bentuk klasifikasi persentase Migran yang memasuki Polandia yang terdaftar secara legal.

Gelombang migrasi melalui *eastern land border* menuju wilayah Uni Eropa tersebut dikategorikan sebagai *irregular migration* karena kurangnya dokumen pendukung para migran untuk memasuki wilayah Eropa Barat atau Polandia dan sebagai respon sekuritisasi pemerintah Polandia yang berbatasan langsung dengan Belarusia melakukan militerisasi perbatasan yang menyebabkan para migran terjebak di perbatasan Polandia Belarusia. Fenomena kontroversial ini berkembang menjadi *humanitarian crisis* yang mengakibatkan perubahan klaim “migran” menjadi “*asylum seekers*” dengan adanya pengajuan permohonan perlindungan

internasional dari para migran (Human Rights Watch 2022; AIDA 2021; Amnesty International 2021)

Berdasarkan Laporan data The Asylum Information Database (AIDA) *Country Report Poland* per-bulan April 2021, warga negara asing yang ingin melewati perbatasan memasuki Polandia dapat dikategorikan sebagai *asylum seekers* jika memenuhi beberapa prosedur, sebagai berikut (AIDA 2021, 11):

1. Access to the Territory

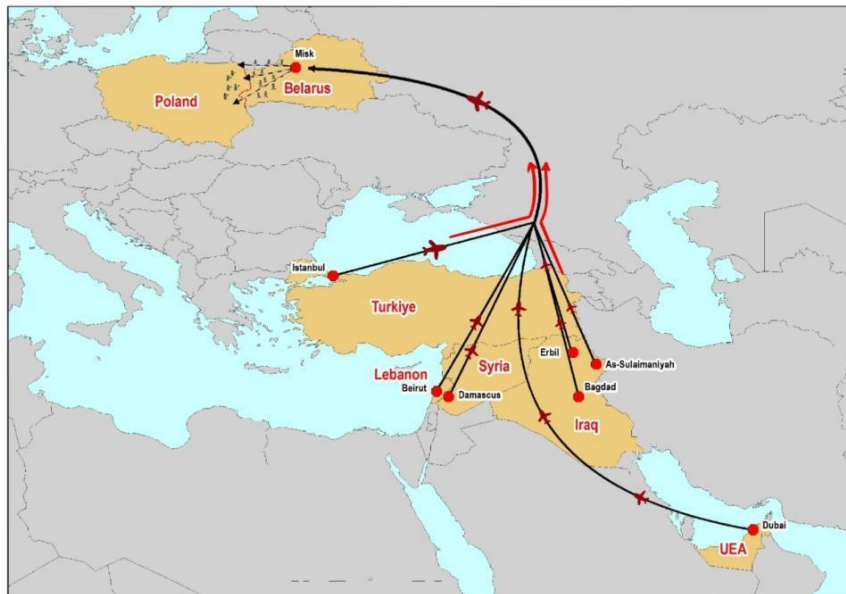
Berdasarkan laporan data The Asylum Information Database (AIDA) *Country Report Poland* per-bulan April 2021, tidak ada jalur legal khusus untuk memasuki wilayah Polandia dengan tujuan mengajukan suaka, selain *family reunification* (AIDA 2021, 25).

“There’s no means beyond family to legally access the territory in the form of humanitarian visas or corridors or resettlement or relocation. In 2021, there were only 91 applications for family reunification.” (AIDA 2021, 25)

Dalam fenomena ini, warga negara Irak yang menggunakan visa turis (*travel group*) secara legal bermigrasi ke Belarusia dan berusaha menyeberangi perbatasan Polandia secara ilegal melakukan perjalanan dari Irak ke pusat transit seperti Istanbul, Dubai, dll dan kemudian terbang ke Minsk (ibukota Belarusia). Transit melalui negara-negara yang dikategorikan aman, sehingga meleburkan klaim atas “*Asylum seekers*” berdasarkan hukum internasional. Sehingga gelombang migrasi ini dikategorikan sebagai gelombang migran ilegal memasuki wilayah Uni Eropa (Politico Europe, 2021).

“The Polish government and EU agencies frame the border crossings as illegal migration, arguing that migrants transited through safe countries and had opportunities to claim asylum earlier.” (Politico Europe, 2021)

Gambar 15. Arus Migrasi Migran Ilegal Timur Tengah ke Perbatasan Polandia melalui Belarusia



(Sumber: Penulis Mengambil dari Beberapa Sumber)

Peta arus migrasi migran Timur Tengah menuju Uni Eropa melalui negara-negara yang dikategorikan aman.

2. First Instance Procedure

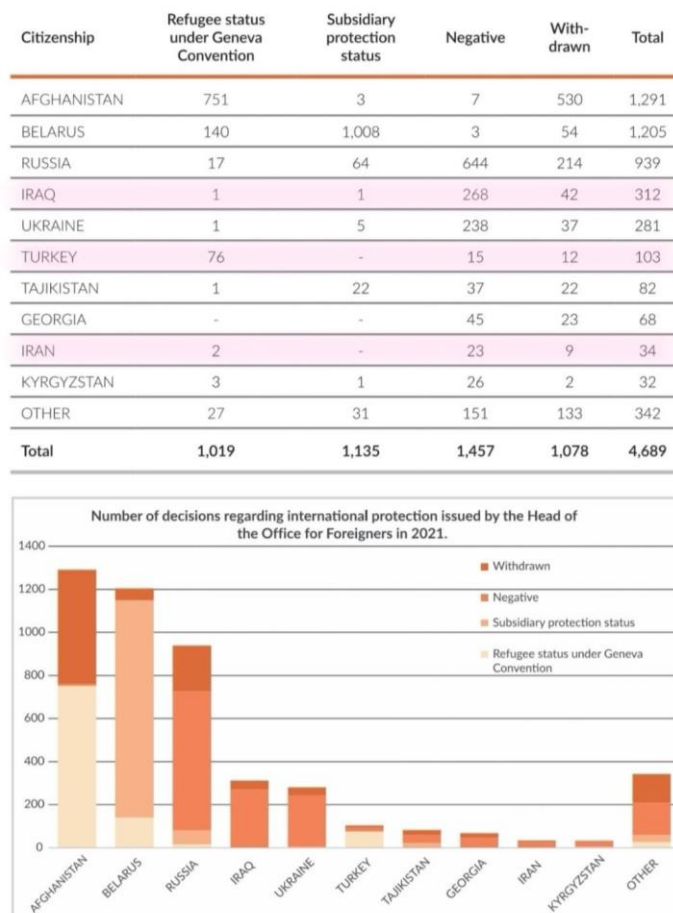
Berdasarkan laporan data The Asylum Information Database (AIDA) *Country Report Poland* per-bulan April 2021, pengajuan permohonan suaka diajukan secara langsung kepada *Straz Graniczna* atau *The Border Guard of Poland* baik di pos perbatasan, setelah memasuki wilayah teritorial Polandia, atau dari *detention centers for foreigners*. Selanjutnya, *The Head of the office for foreigners* melakukan pemeriksaan atas pengajuan permohonan untuk menilai kelayakan status Pengungsi

sesuai peraturan prosedur Dublin (prosedur pengajuan suaka UE) (AIDA 2021, 17-18). Keputusan permohonan suaka yang ditetapkan oleh undang-undang kepada *the Head of the Office for Foreigners* adalah 6 bulan terkait penerimaan dan penolakan permohonan .

Setelah keputusan *the Head of the office for foreigners* diterima, dilanjutkan dengan tahap wawancara serta pemeriksaan data pengajuan permohonan dan menunggu keputusan akhir dengan empat kemungkinan (AIDA 2021, 26-28), yaitu;

1. The applicant is granted Refugee Status;
2. The applicant is granted Subsidiary Protection;
3. The applicant is Rejected;
4. The proceedings are discontinued.

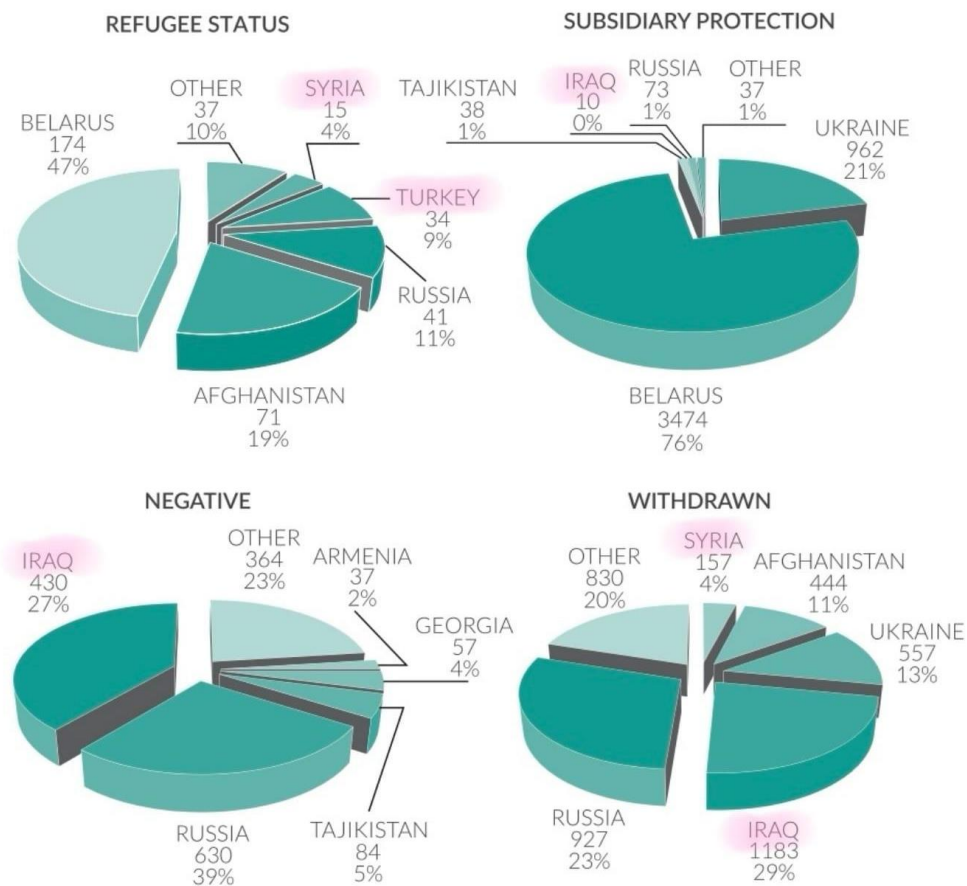
Gambar 16. Number of Decisions Regarding International Protection Issued by Head of the Office for Foreigners in 2021



(Sumber: EMN Annual Report on Migration and Asylum in Poland, 2021)

Data diatas merupakan data gabungan migran legal dan ilegal dari semua migran yang tercatat mengajukan permohonan perlindungan internasional ke Polandia dan data tersebut menyajikan respon penerimaan dan penolakan pemerintah Polandia tahun 2021 dan data ber-highlight pink menunjukkan migran asal Timur Tengah.

Gambar 17. First Instance Decisions on International protection 2022 in Poland



(Sumber: The European Migration Network (EMN) Annual Report on Migration and Asylum in Poland, 2022)

Data diatas merupakan data gabungan migran legal dan ilegal dari semua migran yang tercatat mengajukan permohonan perlindungan internasional ke Polandia dan data tersebut menyajikan respon penerimaan dan penolakan pemerintah Polandia tahun 2022 dan data ber-highlight pink menunjukan migran asal Timur Tengah.

3. *The Second Instance Procedure* (prosedur banding jika prosedur pertama ditolak)

Pengajuan banding dapat diajukan ke Refugee Board dalam waktu 14 hari setelah keputusan pengajuan permohonan pertama ditolak. Keputusan pengajuan banding akan diproses oleh tiga anggota dewan Refugee Board dan ditinjau secara administratif. Dalam proses ini, Dewan Refugee Board akan mengeluarkan salah satu dari tiga opsi keputusan, yaitu:

1. Annual the first instance decision
2. Overturn the Office for Foreigners negative decisions
3. Confirm the decision of the Office for Foreigners

Setelah keputusan ini, masih bisa melakukan banding kembali berupa *Onward Appeal* ke *Voivodeship Administrative Court* in Warsaw dan keputusan pengadilan dapat diajukan ke *Supreme Administrative Court*, yang dimana pemohon dapat menangguhkan eksekusi jika deportasi ke negara asal membahayakan pemohon suaka (AIDA 2021: 18, 29, 31).

4. Nationalities of Applicants

Berdasarkan laporan data The Asylum Information Database (AIDA) *Country Report Poland* per-bulan April 2021. Jumlah pengajuan permohonan status perlindungan internasional tahap pertama pada tahun 2021 sejumlah 7.698 pemohon (AIDA 2021, 7).

Gambar 18. Statistic Applications and Granting of Protection Status at First Instance 2021 in Poland

Statistics								
Overview of statistical practice								
Statistics are provided by the Head of the Office for Foreigners on a weekly basis and are available on their website. ¹ Also the Head of the Office for Foreigners prepares every year an annual report on migration situation in Poland. The statistics presented below were provided upon request.								
Applications and granting of protection status at first instance: 2021								
	Applicants in 2021	Pending at end 2021	Refugee status	Subsidiary protection	Rejection	Refugee rate	Sub. Prot. rate	Rejection rate
Total	7,698	3,850	1,019	1,135	1,457	28.22%	31.43%	40.35%
Breakdown by countries of origin of the total numbers								
Belarus	2,257	1,332	140	1,008	3	12%	87%	0.2%
Afghanistan	1,781	308	751	3	7	98%	0.3%	0.9%
Iraq	1,400	1,115	1	1	268	0.3%	0.3%	99%
Russian Federation	987	423	17	64	644	2.3%	8.8%	88%
Ukraine	261	109	1	5	238	0.4%	2%	97%
Syria	138	62	10	7	1	55%	38.5%	5.5%
Tajikistan	115	68	1	22	37	16%	36.5%	61.5%
Turkey	107	46	76	0	15	83.5%	0	16.5%
Iran	78	45	2	0	23	8%	0	92%
Georgia	71	22	0	0	45	0	0	100%

(Sumber: The Asylum Information Database (AIDA) Country Report Poland, 2021)

Data diatas merupakan data kewarganegaraan migran yang mengajukan permohonan perlindungan internasional ke Polandia dan data ber-highlight pink menunjukkan migran asal Timur Tengah.

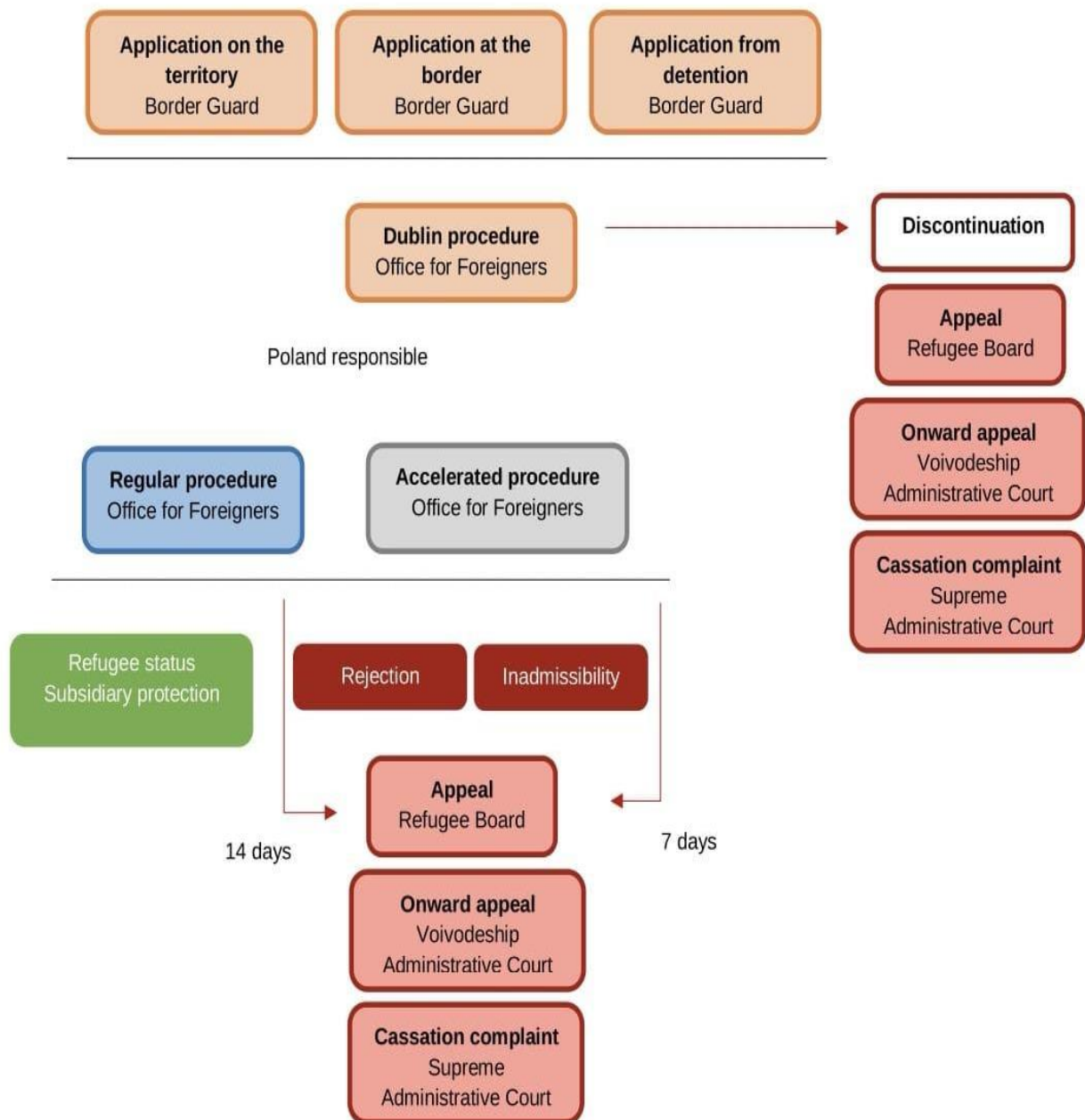
Gambar 19. Legal Framework Asylum Procedure

Overview of the legal framework			
Main legislative acts relevant to asylum procedures, reception conditions, detention and content of protection			
Title (EN)	Original Title (PL)	Abbreviation	Web Link
Law of 13 June 2003 on granting protection to foreigners within the territory of the Republic of Poland (Journal of Laws 2012 pos. 680)	Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 poz. 680)	Law on Protection	https://bit.ly/3s1TJC2 (PL) -uniform text of the act, as of 2021
Law of 12 December 2013 on foreigners (Journal of Laws 2013 pos. 1650)	Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650)	Law on Foreigners	https://bit.ly/3JaDFJY (PL) - uniform text of the act as of 2021
Law of 14 June 1960 Code of administrative procedure (Journal of Laws 2013 pos. 267)	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267)	Code of Administrative Procedure	http://bit.ly/2RFIG5t (PL)
Law of 2 March 2020 on specific solutions related to the prevention and combating COVID-19 and other infectious diseases and crisis they caused	Ustawa dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	COVID Law	https://bit.ly/3djmpkK
Law of 12 March 2022 on assistance to Ukrainian nationals with regard to the arm conflict on the territory of this country	Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Law on assistance to Ukrainian nationals	https://bit.ly/3JC15si The law is applicable as of 24 February 2022

(Sumber: The Asylum Information Database (AIDA) Country Report Poland, 2021)

Data diatas merupakan Undang-undang utama yang relevan dengan prosedur suaka, kondisi penerimaan, penahanan, dan isi perlindungan di Polandia

Bagan 2. Asylum Procedure in Poland 2021



(Sumber: The Asylum Information Database (AIDA) Country Report Poland, 2021)

Chart Flow diatas merupakan rincian bagaimana tahapan prosedur pengajuan permohonan suaka ke Polandia.

BAB III

SEKURITISASI MIGRASI POLANDIA TAHUN 2021 - 2022

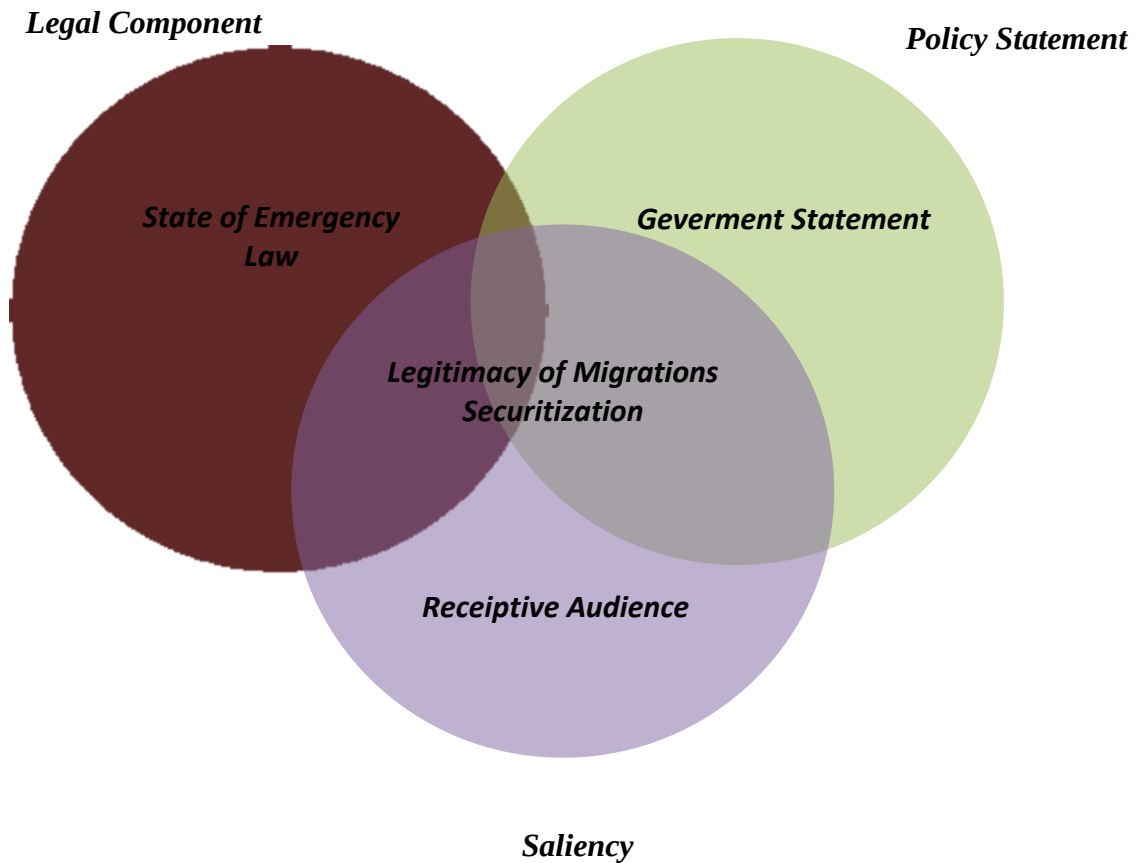
Proses sekuritisasi migrasi oleh Pemerintah Polandia terhadap migran Timur Tengah pada periode 2021–2022 dianalisis menggunakan teori *The Securitization of Migration* dari Philippe Bourbeau, yang memandang migrasi sebagai konstruksi ancaman melalui tindakan institusional dan praktik keamanan yang terlegitimasi (Bourbeau 2011). Dua indikator utama yang dianalisis adalah *institutions*, yang mencakup integrasi migrasi ke dalam kerangka keamanan melalui regulasi, wacana publik, dan perangkat hukum (Bourbeau 2011, 42–45), serta *securitization nexus*, yang merujuk pada praktik interdiksi dan penahanan Migran sebagai respons keamanan (Bourbeau 2011, 47–50). Analisis ini mengidentifikasi keterkaitan antara narasi keamanan dan kebijakan migrasi di Polandia, serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan norma hukum yang berlaku di tingkat nasional.

3.1 Penerapan Aspek Institusional Pemerintah Polandia terhadap Migran Timur Tengah

Dalam kerangka teori *The Securitization of Migration* yang dikembangkan oleh Philippe Bourbeau, aspek institusional merupakan indikator utama dalam proses konstruksi migrasi sebagai ancaman yang sah secara politik dan hukum. Bourbeau mengidentifikasi tiga sub-indikator dalam kategori ini:

1. Komponen Hukum (*Legal Component*), yaitu penggunaan regulasi dan perangkat hukum untuk mengintegrasikan migrasi ke dalam kerangka keamanan;
2. Pernyataan Kebijakan (*Policy Statement*), yakni artikulasi ancaman melalui pernyataan resmi dari aktor negara;

3. Tingkat Visibilitas (*Saliency*), yang mencerminkan intensitas kehadiran isu migrasi dalam wacana publik dan politik, serta kapasitasnya untuk memobilisasi respons keamanan (Bourbeau 2011, 42–47).



Ketiga sub-indikator tersebut membentuk fondasi institusional yang memungkinkan tindakan sekuritisasi dilegitimasi secara hukum, sosial, dan administratif. Dalam konteks Polandia pada periode 2021–2022, ketiganya beroperasi secara sinkron dan saling memperkuat dalam membingkai migrasi dari Timur Tengah sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, integritas teritorial, dan identitas kolektif. Analisis terhadap masing-masing sub-indikator akan disajikan dalam bagian berikut, guna menunjukkan bagaimana konstruksi ancaman tersebut terlembagakan dalam praktik dan struktur negara.

3.1.1 Penerapan Legal Component Pemerintah Polandia terhadap Migran Timur Tengah

Dalam kerangka teori *The Securitization of Migration*, Philippe Bourbeau (2011) menekankan bahwa proses sekuritisasi tidak hanya berlangsung melalui wacana politik, tetapi juga melalui *institutional embedding* yakni integrasi narasi ancaman ke dalam regulasi dan praktik administratif negara (Bourbeau 2011, 41). Di Polandia, proses ini terlihat jelas selama krisis perbatasan tahun 2021–2022, ketika migran dari Timur Tengah menjadi subjek eksklusi melalui transformasi hukum migrasi dan kebijakan perbatasan.

Landasan hukum utama yang digunakan adalah *Act of December 12, 2013 on Foreigners*, yang paling mencolok adalah penggunaan Pasal 303b, yang menjadi dasar hukum bagi praktik *pushback* di perbatasan Polandia–Belarusia, sebagaimana tercatat dalam 2.549 keputusan selama tahun 2022 (PRAB Report 2022).

Selain itu, revisi hukum pada Oktober 2021 terhadap *Act on Foreigners* memungkinkan deportasi cepat tanpa proses hukum penuh, melanggar prinsip *non-refoulement* (HFHR 2021). Pemerintah Polandia juga menetapkan *State of Emergency Regulation* di zona perbatasan antara September hingga Desember 2021, yang membatasi akses media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memperkuat narasi sekuritisasi negara dan menutup ruang advokasi (Government of Poland 2021). Di sisi lain, *Polish Border Guard Act* memberikan kewenangan luas kepada aparat untuk melakukan penahanan dan pengusiran, menjadikannya instrumen administratif utama dalam sekuritisasi migrasi (HFHR 2021).

3.1.1.1 Article 303b of the Polish Foreigners Act

Pasal 303b Undang-Undang Orang Asing Polandia mengatur prosedur yang digunakan oleh penjaga perbatasan dalam menangani arus migrasi di perbatasan Polandia. Berdasarkan laporan *The Protecting Rights at Borders* (PRAB) 2022, pasal ini digunakan dalam 2.549 keputusan terkait migrasi di perbatasan Polandia (Polish Foreigners Act, Article 303b).

Article 303b Amendment "In cases of a significant increase in the number of foreigners illegally crossing the border of the Republic of Poland, the Border Guard may issue decisions on the obligation to return without initiating full administrative proceedings. These decisions are issued immediately after apprehension and may include a temporary ban on re-entry into Poland and the Schengen Area." – Journal of Laws of Republic of Poland

3.1.1.2 Amendment to the Act on Foreigners

Amandemen terhadap *Act on Foreigners* yang disahkan pada Oktober 2021 memperkenalkan prosedur deportasi cepat terhadap orang asing yang masuk secara tidak sah ke wilayah Polandia. Dalam dokumen resmi pemerintah disebutkan:

"The amending Act introduces a number of changes to the provisions of the Act on Foreigners... including the possibility of issuing a return decision without a full legal procedure." (Gov.pl, 2022)

Perubahan ini memungkinkan aparat untuk mengeluarkan keputusan pengusiran tanpa proses hukum penuh, termasuk tanpa akses ke pengacara atau mekanisme banding yang memadai. Praktik ini secara langsung bertentangan

dengan prinsip non-refoulement yang dijamin dalam hukum internasional, dan telah dikritik oleh organisasi HAM sebagai bentuk pelemahan perlindungan hukum terhadap pencari suaka (HFHR 2021).

3.1.1.3 Polish Border Guard Act

Polish Border Guard Act memberikan kewenangan luas kepada aparat perbatasan untuk melakukan penahanan, pemeriksaan, dan pengusiran terhadap migran yang dianggap masuk secara ilegal. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat sekuritisasi yang memungkinkan tindakan represif tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Dalam praktiknya, aparat menggunakan kewenangan ini untuk melakukan *push back* dan penahanan sewenang-wenang.

“Border Guard officers have been granted extended powers to detain and return migrants without judicial oversight, raising serious concerns about the legality and proportionality of these actions.” (HFHR 2021)

Kebijakan ini memperkuat peran institusi keamanan dalam membingkai migrasi sebagai ancaman eksistensial, sejalan dengan indikator I-1 dalam kerangka Bourbeau tentang *legal components* yang menghubungkan migrasi dengan isu keamanan.

3.1.1.4 State of Emergency Regulation

Regulasi State of Emergency diberlakukan oleh pemerintah Polandia antara September hingga Desember 2021 di zona perbatasan dengan Belarusia. Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah:

“The state of emergency prohibits access to the border zone for journalists, NGOs, and humanitarian organizations, citing national security concerns.”
(Government of Poland, 2021)

Kebijakan ini membatasi akses media, LSM, dan organisasi kemanusiaan ke wilayah terdampak, menciptakan ruang tertutup dari pengawasan publik. Dalam konteks sekuritisasi, regulasi ini memperkuat monopoli narasi negara dan menghalangi kontestasi terhadap kebijakan migrasi yang represif. Hal ini memperkuat indikator I-2 dan I-3 dalam teori Bourbeau, yaitu *policy statement* dan *saliency*, di mana negara secara aktif membingkai migrasi sebagai ancaman keamanan yang harus dikendalikan secara eksklusif.

Melalui analisis terhadap hukum dan regulasi yang berlaku sepanjang tahun 2021 - 2022, terlihat bahwa Pemerintah Polandia tidak hanya menggunakan hukum sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen sekuritisasi yang mengatur mobilitas secara terstruktur. Migrasi dari Timur Tengah dikonstruksi sebagai ancaman yang harus diatur, dibatasi, dan dicegah melalui urutan kebijakan yang mereproduksi kebijakan eksklusi. Dalam kerangka Bourbeau, *legal component* ini menjadi bukti bahwa sekuritisasi telah terinstitusionalisasi, dan migrasi tidak lagi dipahami sebagai fenomena sosial, melainkan sebagai objek kontrol dalam keamanan negara.

Tabel 11. Regulasi Terkait Sekuritisasi Migrasi Polandia 2021 – 2022

No	Pasal atau Regulasi	Tahun Aktif	Fungsi Utama dalam Sekuritisasi
1.	<i>Article 303b</i>	Aktif 2021-2022	Dasar hukum <i>pushback</i> di perbatasan, digunakan dalam ribuan keputusan selama krisis
2.	<i>Amendment to the Act on Foreigners</i>	Disahkan 2021 Berlaku mulai 29 Januari 2022	Mengizinkan deportasi cepat tanpa proses hukum penuh
3.	<i>Polish Border Guard Act</i>	Aktif 2021-2022	Memberi kewenangan luas kepada aparat untuk Penahanan dan pengusiran migran
4.	<i>State of Emergency Regulation</i>	Dideklarasikan 2021 Berlaku 30 hari dan diperpanjang	Membatasi akses media dan LSM, memperkuat narasi ancaman negara

(Sumber. Republic of Poland, 2013; PRAB, 2022; HFHR, 2021; Government of Poland, 2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa regulasi yang awalnya bersifat administratif telah mengalami pergeseran fungsi menjadi alat eksklusi dan kontrol. Revisi hukum tahun 2021 bahkan mengizinkan deportasi tanpa proses hukum

penuh, yang bertentangan dengan prinsip non-refoulement dan menunjukkan kelemahan perlindungan hukum.

Melalui analisis regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Polandia telah mengoperasionalkan logika sekuritisasi migrasi melalui *institutional embedding* (isu keamanan migrasi yang telah dilembagakan secara resmi). Regulasi yang aktif selama krisis perbatasan 2021–2022 tidak hanya mengatur mobilitas manusia, tetapi juga membentuk narasi ancaman yang dilegitimasi secara hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi bukan sebagai pelindung hak, melainkan sebagai instrumen eksklusif yang memperkuat posisi negara dalam mengelola migrasi sebagai isu keamanan.

3.1.2 Policy Statement Pemerintah Polandia Merespon Migran Timur Tengah

Dalam kerangka teori securitization Philippe Bourbeau, indikator *Policy Statement* merujuk pada pernyataan resmi pemerintah yang menunjukkan bagaimana migrasi dikonstruksi sebagai isu keamanan melalui kebijakan, pidato, dan dokumen kelembagaan. Pada kasus krisis perbatasan Polandia–Belarusia tahun 2021–2022, pemerintah Polandia secara aktif membingkai kedatangan migran Timur Tengah sebagai bentuk ancaman yang bersifat geopolitik dan strategis, bukan semata-mata sebagai fenomena kemanusiaan.

3.1.2.1 Pernyataan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki

Puncak framing Institusional terjadi pada November 2021, ketika Perdana Menteri Mateusz Morawiecki secara eksplisit menyatakan bahwa dalam fenomena ini illegal migration dinyatakan sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional dan Uni Eropa.

“We are dealing with a well-organized action aimed at breaking the integrity of our border. The goal is clear: to destabilize Poland and thus the entire European Union. We cannot allow our border to become a gateway for illegal immigration that threatens our security.” – Prime Minister Mateusz Morawiechki Desember 2021 (Hansard of the Sejm, Sikorski 2022).

Pernyataan ini tidak hanya memperkuat legitimasi Tindakan keamanan perbatasan, tetapi juga menjustifikasi kebijakan Penolakan masuk (*pushback*) dan sebagai respons terhadap ancaman eksternal.

3.1.2.2 Pernyataan Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi Mariusz Kaminski

Kementerian Dalam Negeri Polandia juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut krisis migrasi yang terjadi di perbatasan merupakan bentuk *destabilization*. Dalam siaran pers dan wawancara, pejabat kementerian menekankan bahwa arus migran irregular dan ilegal ini harus diberlakukan sekuritisasi karena mengganggu stabilitas nasional.

“The Polish border is a bulwark of the European Union. We will defend it against any form of illegal immigration and destabilization” – Ministry of Interior Mariusz Kaminski October 2021 (ECRE 2022).

3.1.2.3 Pernyataan Kebijakan Ministry of National Defence of Poland Mariusz Blaszczak

Pada Januari 2022, pemerintah Polandia memulai pembangunan tembok fisik di sepanjang perbatasan perbatasan dengan Belarusia. Para migran ilegal dianggap sebagai musuh yang harus dihalangi dan hal ini menunjukkan bahwa negara memprioritaskan pendekatan keamanan terhadap Migrasi.

“The barrier we are building is a necessity. It is a response to a hybrid attack, the front line of which are people (migrants) being pushed towards our border. We must stop this wave to protect our citizens.” – Ministry of National Defence of Poland Mariusz Blaszczak, January 2022.

Tindakan ini memperkuat framing bahwa Migrasi adalah ancaman yang harus dihadapi dengan alat-alat pertahanan negara.

3.1.3 Saliency Receptive Audience Polandia

Dalam kerangka sekuritisasi migrasi, indikator *saliency* mengukur sejauh mana wacana ancaman berhasil menembus ruang publik dan institusional, membentuk apa yang disebut Bourbeau sebagai *receptive audience*, yakni:

1. *Media Agents*
2. *Political Agents*

Menerima dan mereproduksi narasi ancaman (Bourbeau 2011, 45). Di Polandia, proses ini terlihat jelas selama krisis migrasi Timur Tengah tahun 2021–2022, ketika *framing* migran sebagai ancaman mendominasi liputan media, debat parlemen, dan survei opini publik.

3.1.3.1 Framing Media dan Respon Publik

Untuk menggambarkan dinamika secara sistematis, dua tabel selanjutnya menyajikan data *saliency* dari dua dimensi utama:

- (1) Framing media arus utama
- (2) Respons publik terhadap narasi sekuritisasi.

Telewizja Polska (TVP), *Gazeta Polska*, dan *Gazeta Wyborcza* adalah tiga media utama di Polandia. TVP (*Telewizja Polska*) adalah lembaga penyiaran publik milik negara yang menyediakan berita, hiburan, dan program budaya. *Gazeta Polska* adalah majalah mingguan yang sering menyoroti isu-isu nasional dan politik dari sudut pandang konservatif. Sementara itu, *Gazeta Wyborcza* adalah surat kabar harian yang dikenal luas dengan liputan terhadap isu sosial dan politik. Ketiganya memainkan peran penting dalam membentuk opini publik di Polandia (Głowacki 2021; Pankowski 2018).

Data ini menunjukkan bagaimana konstruksi ancaman tidak hanya diproduksi oleh negara, tetapi juga diterima dan diperkuat oleh masyarakat dan institusi. Indikator ini mengukur sejauh mana isu sekuritisasi mendominasi publik atau media, parlemen, dan opini masyarakat dengan membentuk *receptive audience* (Bourbeau, 2011).

Untuk melihat bagaimana media Polandia membingkai krisis migrasi di Polandia, analisis ini menggunakan contoh 15 artikel atau pemberitaan dari tiga media utama: TVP, *Gazeta Polska*, dan *Gazeta Wyborcza*. Jumlah sampel ini dipilih dari periode paling intens (November 2021), saat isu ini paling banyak diberitakan. Pendekatan ini mengikuti teori *The Securitization of Migration* dari Philippe Bourbeau, yang menjelaskan bahwa migrasi dianggap sebagai ancaman bukan

karena sifatnya, tapi karena media dan aktor politik mem-bingkainya. Tabel berikut menunjukkan bagaimana masing-masing media membentuk narasi tersebut.

Tabel 12. Framing Media Utama Polandia Tahun 2021

Media	Judul	Tanggal	Framing Dominan	Kutipan
TVP	<i>“Migranci jako broń hybrydowa”</i> “Migran sebagai senjata hibrida”	12 November 2021	Ancaman	<i>“.. To nie kryzys humanitarny, to atak na granicę Polski.”</i> “.. Ini bukan krisis kemanusiaan, ini serangan terhadap perbatasan Polandia.”
	<i>“Polska wzmacnia ochronę granicy”</i> “Polandia memperkuat pertahanan perbatasan”	14 November 2021	Ancaman	<i>“.. Migranci są wykorzystywani przez Białoruś do destabilizacji Unii Europejskiej.”</i> “.. Migran digunakan oleh Belarusia untuk mengganggu stabilitas Uni Eropa.”
	<i>“Operacja wojskowa na granicy”</i> “Operasi militer di zona perbatasan”	16 November 2021	Ancaman	<i>“.. Wojsko polskie odpiera prowokacje ze strony migrantów.”</i> “.. Militer Polandia menghadapi provokasi dari para migran.”
	<i>“Statystyki nielegalnych przekroczeń granicy”</i> “Statistik migran ilegal meningkat”	18 November 2021	Netral	<i>“.. Liczba nielegalnych przekroczeń wzrosła o 30% w porównaniu z poprzednim miesiącem.”</i> “.. Jumlah Migran ilegal meningkat 30% dibanding bulan sebelumnya.”
	<i>“Warunki w obozie migrantów po stronie Białorusi”</i>	20 November 2021	Kemanusiaan	<i>“.. Dzieci śpią na zamrzniętej ziemi bez pomocy medycznej.”</i> “.. Anak-anak tidur di tanah beku tanpa bantuan medis.”

	“Kondisi kamp migran di Belarusia”			
Gazeta Polska	“ <i>Migranci jako zagrożenie geopolityczne</i> ” “Migran sebagai ancaman geopolitik”	13 November 2021	Ancaman	“.. <i>Reżim Łukaszenki wykorzystuje migrantów jako narzędzie polityczne.</i> ” “.. Reżim Lukashenko menggunakan migran sebagai alat politik.”
	“ <i>Polska musi stanowczo reagować na prowokacje</i> ” “Polandia harus tegas terhadap provokasi”	15 November 2021	Ancaman	“.. <i>Nie możemy ulec presji ze strony migrantów.</i> ” “.. Kita tidak bisa tunduk pada tekanan dari para migran”
	“ <i>Statystyki bezpieczeństwa granicznego</i> ” “Statistik keamanan perbatasan”	17 November 2021	Netral	“.. <i>Liczba patroli została zwiększona w celu utrzymania stabilności.</i> ” “.. Jumlah patroli ditingkatkan untuk menjaga stabilitas.”
	“ <i>Kryzys migracyjny: solidarność czy słabość?</i> ” “ <i>Krisis migran: solidaritas atau kelemahan?</i> ”	19 November 2021	Ancaman	“.. <i>Zbyt dużo empatii może osłabić państwo.</i> ” “.. Terlalu banyak empati bisa melemahkan negara.”
	“ <i>Warunki w obozie migrantów na Białorusi</i> ” “ <i>Kondisi kamp Belarusia</i> ”	21 November 2021	Kemanusiaan	“.. <i>Niektórzy migranci cierpią na hipotermię i głód.</i> ” “.. Beberapa migran mengalami hipotermia dan kelaparan.”

Gazeta Wyborcza	<i>“Marzną w lasach, bez pomocy”</i> “Mereka membeku di hutan, tanpa bantuan”	12 November 2021	Kemanusiaan	<i>“.. Dzieci i kobiety śpią w lasach bez jedzenia i lekarzy.”</i> “.. Anak-anak dan wanita tidur di hutan tanpa makanan dan dokter.”
	<i>“Lekarze bez granic nie wpuszczeni”</i> “Dokter tanpa batas dilarang masuk”	14 November 2021	Kemanusiaan	<i>“.. Rząd zabronił pomocy medycznej w strefie kryzysowej.”</i> “.. Pemerintah melarang bantuan medis masuk ke zona krisis.”
	<i>“Migranci to ludzie, nie zagrożenie”</i> “Migran adalah manusia, bukan ancaman”	16 November 2021	Kemanusiaan	<i>“.. To nie broń, to ofiary.”</i> “.. Mereka bukan senjata, mereka adalah korban.”
	<i>“Statystyki migracyjne i polityka UE”</i> “Statistik migrasi dan kebijakan UE”	18 November 2021	Netral	<i>“.. UE rozważa nowe zasady dotyczące migracji kryzysowej.”</i> “.. UE mempertimbangkan kebijakan baru untuk migrasi darurat.”
	<i>“Polska a prawa człowieka”</i> “Polandia dan hak asasi manusia”	20 November 2021	Ancaman	<i>“.. Rząd określa migrantów jako zagrożenie dla suwerenności.”</i> “.. Pemerintah menyebut migran sebagai ancaman terhadap kedaulatan”

(Sumber: TVP, 2021; Gazeta Polska, 2021; Gazeta Wyborcza, 2021)

Media konservatif seperti *TVP* dan *Gazeta Polska* secara konsisten mem-framing migran sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial. Sebaliknya, *Gazeta Wyborcza* menunjukkan narasi sekuritisasi dengan proporsi tinggi framing kemanusiaan.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) adalah lembaga riset opini publik di Polandia yang didirikan pada tahun 1980. CBOS secara rutin melakukan survei nasional tentang sikap masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, serta menjadi salah satu sumber utama data statistik yang digunakan oleh media, akademisi, dan pembuat kebijakan. Lembaga ini dikenal karena metodologinya yang sistematis dan cakupan survei yang luas, mencerminkan dinamika opini publik Polandia dari waktu ke waktu (CBOS 2023).

Debat parlemen dan kampanye politik, yang dimana sejak Agustus 2021 isu migrasi mendominasi sesi DPR, dengan lebih 40 interupsi dan interpelasi yang menyoroti perlunya tindakan keamanan ekstra (Rahma, 2021), dan Menurut laporan resmi *Centrum Badania Opinii Społecznej* (CBOS) pada November 2021, sikap publik Polandia terhadap pengungsi menunjukkan kecenderungan negatif. Sebanyak 48% responden menolak menerima pengungsi dari negara konflik, sementara 42% bersedia menerima pengungsi hanya untuk sementara waktu, dan hanya 9% mendukung penerimaan permanen. Temuan ini menegaskan adanya resistensi sosial yang kuat terhadap migrasi, yang dapat dianalisis dalam kerangka securitization di mana isu migrasi diperlakukan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional (CBOS 2021). Dominasi isu ini menciptakan *securitizing move* dimana *audience* (publik dan pembuat kebijakan) menyepakati urgensi ancaman, dan

membuka ruang bagi kebijakan pengetatan dan tindakan sekuritisasi tanpa perlawanan signifikan.

Berdasarkan data *survey Centrum Badania Opinii Spoolecznej* (CBOS) pada Desember 2021 menunjukkan sentimen publik, sebagai berikut:

Tabel 13. Survei Sentimen Publik Terkait Migran Timur Tengah

Kategori	Data atau Temuan Utama	Relevansi Akademik
Periode Survei	29 November – 12 Desember 2021	Konteks temporal saat krisis migran Belarusia-Polandia memuncak, saliency tinggi
Jumlah Responden	1.063 orang dewasa, sampel nasional	Menunjukkan cakupan representative secara nasional
Sikap Terhadap Pengungsi	48% menolak menerima pengungsi; 42% menerima sementara; 9% menerima permanen	Distribusi sikap publik yang jelas, menunjukkan resistensi sosial terhadap migran
Dukungan Terhadap Kebijakan Pemerintah	Mayoritas mendukung kebijakan keras pemerintah dalam melindungi perbatasan (tanpa angka spesifik dalam laporan)	Bukti penerimaan publik terhadap proses <i>securitization</i>

(Sumber: CBOS publication No. 42/2021)

Data *survey* yang dirilis oleh *Centrum Badania Opinii Spoolecznej* (CBOS) pada Desember 2021, terlihat bahwa sentimen publik Polandia terhadap isu migrasi sangat dipengaruhi oleh narasi keamanan yang berkembang selama krisis perbatasan. Mayoritas responden menyatakan dukungan terhadap kebijakan *pushback* dan pembatasan akses terhadap prosedur suaka, dengan alasan perlindungan terhadap kedaulatan nasional dan stabilitas sosial.

3.1.3.2 *Political Agents Implication of Policy statement*

Philippe Bourbeau dalam “*The Securitization of Migration*” menilai bahwa keberhasilan sekuritisasi oleh aktor politik bergantung pada tiga aspek utama:

1. Kekuatan ujaran ancaman
2. Institusionalisasi diskursus (sebuah ide dan konsep yang diresmikan)
3. Konteks sosial politik yang mendukung.

Menekankan bahwa “*security speech acts are central to the process of securitization,*” terutama ketika migrasi dibingkai sebagai ancaman eksistensial yang mengancam stabilitas nasional (Bourbeau 2011, 38). Meskipun jumlah kutipan terbatas, analisis ini mengacu pada prinsip *saliency* Bourbeau (2011), yaitu intensitas ujaran, posisi aktor, dan dukungan lembaga atau kebijakan. Kutipan dari Presiden dan Menteri menunjukkan framing ancaman eksistensial yang diikuti oleh kebijakan darurat, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengukuran *saliency* yang sesuai.

Tabel 14. Saliency - Prime Minister Mateusz Morawiecki

Tingkat Saliency			
Aktor Politik	Prime Minister Mateusz Morawiecki		
Kutipan	“We cannot allow our border to become a gateway for illegal immigration that threatens our security”	“Poland must defend its sovereignty and cultural identity.”	“The EU’s pressure to accept quotas undermines our security.”
Tahun	November 2021	Oktober 2021	Desember 2021
Tema	Keamanan Geopolitik	Identitas Nasional	Resistensi terhadap UE
Interpretasi	Ujaran ancaman langsung, muncul saat krisis perbatasan; saliency tinggi karena pernyataan diikuti kebijakan pagar dan militerisasi	Mengaitkan Migrasi dengan nilai nasional; memperkuat eksklusi simbolik dalam retorika politik	Mempengaruhi opini publik; <i>saliency</i> rendah karena tidak diikuti oleh kebijakan langsung

(Sumber: Daily Poland Live, 2021)

Tabel 15. Saliency Minister of Interior - Mariusz Kaminski

Tingkat Saliency			
Aktor Politik	Minister of Interior Mariusz Kaminski		
Kutipan	<i>“We are building a barrier to stop illegal migration and protect our citizens.”</i>	<i>“Migrants being used as tools in a political game”</i>	<i>“Poland stands for order and responsibility in migration policy.”</i>
Tahun	September 2021	Oktober 2021	Januari 2022
Tema	Infrastruktur keamanan	Manipulasi Belarusia	Tata Kelola dan etika
Interpretasi	Ujaran ancaman langsung; <i>saliency</i> tinggi karena diikuti pembangunan pagar dan regulasi pushback.	Membangun narasi ancaman eksternal; <i>saliency</i> tinggi karena muncul saat krisis dan didukung oleh media	Menekankan nilai <i>administrative</i> ; <i>saliency</i> rendah karena tidak diikuti Tindakan konkret.

(Sumber: Daily Poland Live, 2021)

Tabel 16. Saliency – President Andrzej Duda

Tingkat Saliency			
Aktor Politik	Presiden Andrzej Duda		
Kutipan	<i>“We will not let Poland be destabilized by uncontrolled migration”</i>	<i>“Polish values must be protected from external pressure”</i>	<i>“Citizen must understand the risks posed by illegal crossings”</i>
Tahun	November 2021	Oktober 2021	Desember 2021
Tema	Stabilitas nasional	Nilai dan tradisi	Edukasi publik
Interpretasi	Ujaran ancaman langsung; <i>saliency</i> tinggi karena muncul dalam pidato resmi dan mendukung kebijakan darurat.	Mengaitkan Migran dengan ancaman terhadap nilai nasional; memperkuat aksi diskriminatif.	Bertujuan membentuk opini publik; <i>saliency</i> rendah karena tidak diikuti kebijakan langsung.

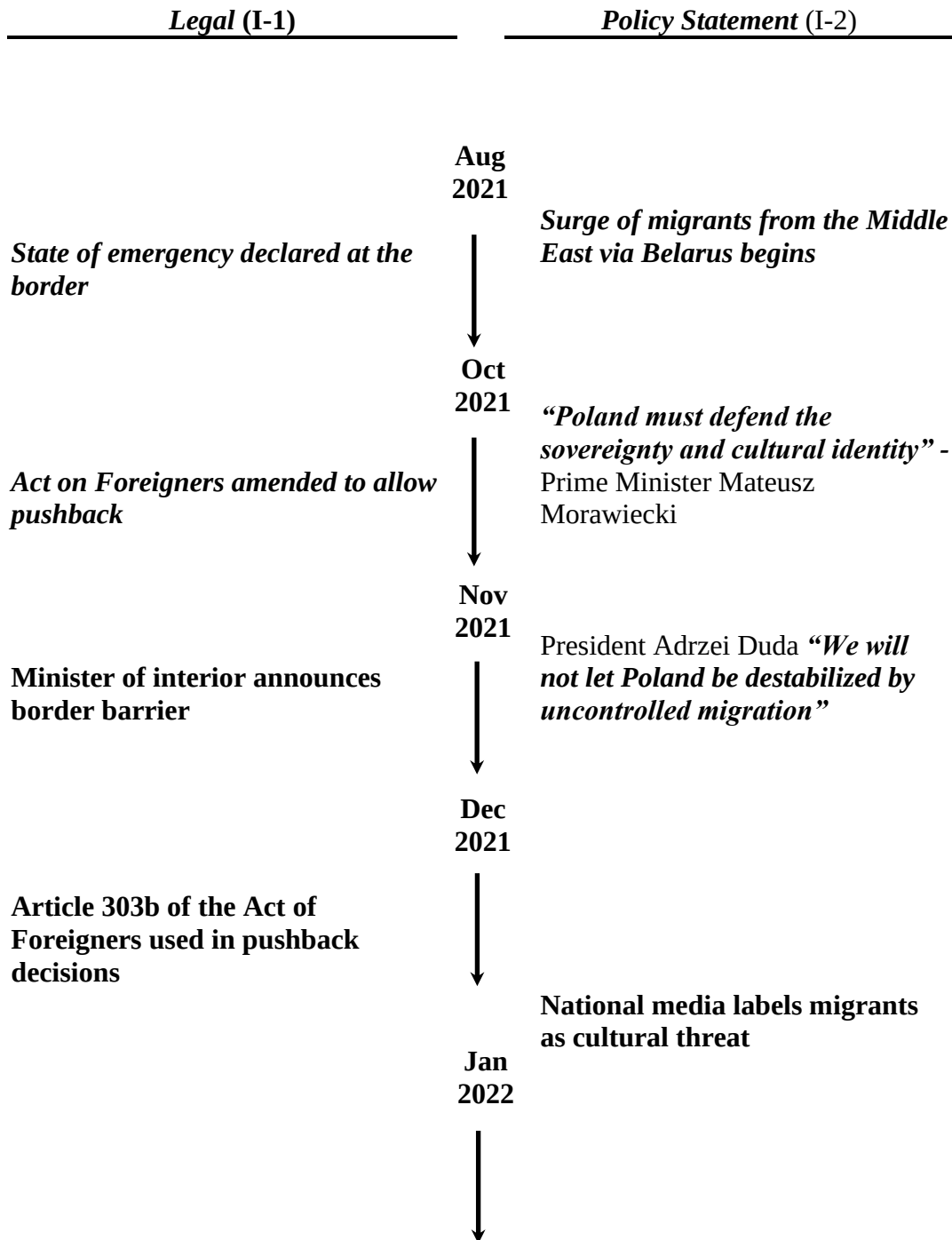
(Sumber: Daily Poland Live, 2021)

Respon dari Perdana Menteri, Presiden, dan Menteri Dalam Negeri Polandia terhadap arus migran Timur Tengah pada tahun 2021–2022 menunjukkan pola sekuritisasi yang selaras dengan konsep teori Bourbeau. Melalui pernyataan publik, mereka secara konsisten membingkai migrasi sebagai ancaman eksistensial

terhadap keamanan nasional dan integritas perbatasan Uni Eropa. Ujaran ancaman seperti “serangan hibrida Belarusia” atau “merusak stabilitas negara” digunakan untuk memperkuat legitimasi kebijakan darurat seperti pembangunan pagar perbatasan dan penolakan masuk secara kolektif. Posisi institusional mereka sebagai aktor negara memperkuat legitimasi diskriminasi, yang kemudian diinstitusionalisasikan melalui regulasi seperti *Article 303b* dan praktik *pushback* oleh penjaga perbatasan. Dengan demikian, intensitas ujaran, otoritas aktor, dan dukungan konteks sosial-politik menunjukkan bahwa proses sekuritisasi terhadap migran Timur Tengah telah memenuhi indikator *saliency* sebagaimana dijelaskan oleh Phillipe Bourbeau.

Sebagai bagian dari analisis institusional terhadap kebijakan sekuritisasi migrasi di Polandia, penting untuk memahami bagaimana negara merespons krisis migran tahun 2021–2022 melalui instrumen hukum dan pernyataan kebijakan. Proses sekuritisasi tidak hanya berlangsung dalam wacana politik, tetapi juga tercermin dalam perubahan regulatif dan deklarasi resmi yang mempengaruhi mobilitas lintas batas secara langsung. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan terstruktur, bagian berikut menyajikan sebuah *visual timeline* yang menggabungkan dua dimensi utama:

Timeline of institutional indicators of Poland 2021 - 2022



(Sumber: Bourbeau, 2011, Polish Foreigners Act, 2013; PRAB Report, 2022; Government of Poland, 2021, HRHR, 2021, TVP, 2021)

3.2 Penerapan *Sekuritisasi Nexus* Pemerintah Polandia Terhadap Migran Timur Tengah

Dalam kerangka teori “*the Securitization of Migration*”, Indikator kedua, yaitu *securitization nexus* yang menggunakan 2 indikator utama; *Interdiction* (P-1) dan *Detention of immigrants* (P-2).

1. *Interdiction* (P-1): Tindakan pencegahan migran memasuki wilayah negara.
2. *Detention of Immigrants* (P-2): Penahanan administratif terhadap migran setelah memasuki wilayah negara sebagai bentuk kontrol keamanan.

Kedua elemen ini mencerminkan bagaimana konstruksi ancaman yang dibentuk melalui wacana dan institusi, kemudian terapkan ke dalam kebijakan yang bersifat represif dan diskriminatif. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana Pemerintah Polandia mengoperasionalkan sekuritisasi migrasi melalui praktik yang berdampak langsung terhadap hak dan kebebasan para migran. Analisis ini menunjukkan bahwa sekuritisasi praktik yang terwujud dalam tindakan nyata negara terhadap migran, yang dilegitimasi oleh hukum nasional dan narasi politik keamanan (Ministry of Interior of Poland 2021).

3.2.1 *Interdiction sebagai Praktik Pencegahan dalam Sekuritisasi Migrasi*

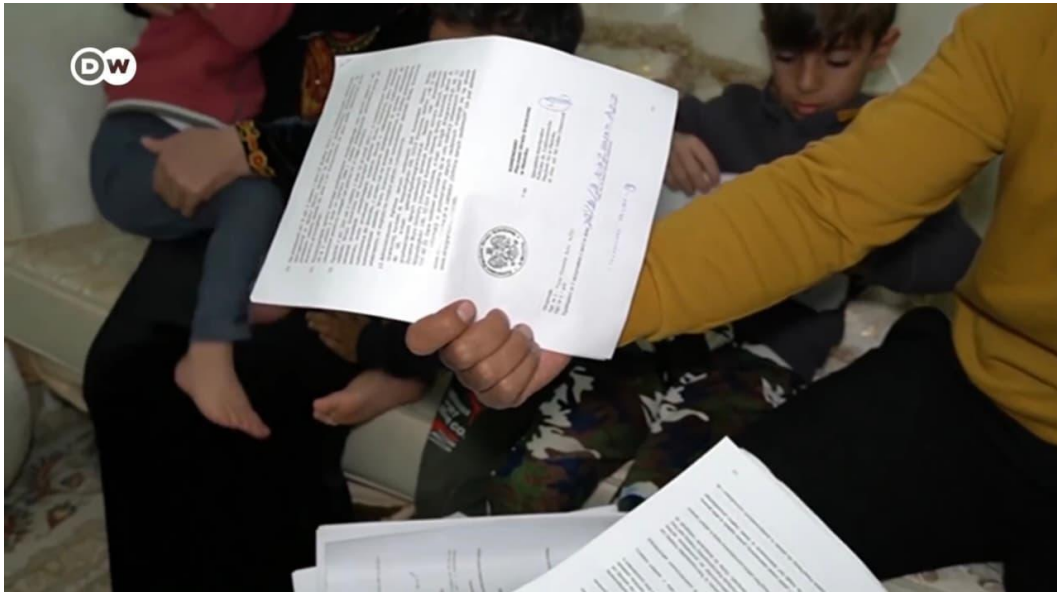
Interdiksi merupakan aktivitas yang diarahkan untuk mencegah perpindahan orang dari sumbernya. Ini merupakan serangkaian praktik yang berupaya menghentikan arus Migrasi dengan melarang, mencegat, dan membelokan mereka saat sedang bergerak atau sebelum pergerakan dimulai. Interdiksi berdasarkan “*The Securitization of Migration Theory*” karya Phillipe Bourbeau mencakup

pemberlakuan sanksi pada perusahaan pengangkut yang membawa migran ilegal, persyaratan bagi migran untuk memperoleh visa tidak sesuai atau tidak lengkap, penempatan petugas imigrasi di *foreign airports* untuk tujuan pendeteksian, pencegatan kapal laut di perairan internasional atau teritorial, serta pengembalian pengaju klaim pengungsi ke negara transit melalui penggunaan konsep "negara ketiga yang aman" atau "negara suaka pertama."

Fenomena *migration crisis* di perbatasan Polandia Belarusia, warga negara Irak, dan Suriah yang bermigrasi ke wilayah Belarusia menuju perbatasan Polandia dikategorikan sebagai migran bukan sebagai *asylum seekers* atau *refugees*, hal ini dikarenakan pergerakan migrasi yang tidak melalui jalur pengungsi regular sesuai hukum internasional. Gelombang migrasi melalui *eastern land border* menuju wilayah Uni Eropa tersebut dikategorikan sebagai *irregular migration* karena kurangnya dokumen pendukung para migran untuk memasuki wilayah Eropa Barat atau Polandia (Human Rights Watch 2022; AIDA 2021; Amnesty International 2021).

Berdasarkan wawancara DW News dengan narasumber warga negara Irak yang berhasil melewati perbatasan, mereka bertahan selama 4 hari di dalam hutan perbatasan Polandia Belarusia, dan berhasil menyebrangi perbatasan memasuki Polandia setelah melakukan percobaan sebanyak enam kali. Namun, berakhir dengan deportasi oleh otoritas Polandia.

**Gambar 20. Dokumen Deportasi Migran Irak yang Berhasil
Menyeberangi Perbatasan Polandia Belarusia**



(Sumber: DW News, 2021)

Gambar merupakan dokumen deportasi resmi yang didapatkan migran ilegal Irak dari otoritas Polandia setelah berhasil melakukan penyebrangan melewati perbatasan Polandia Belarusia dan Berdasarkan data resmi EMN Annual Report of Migration 2021, Sekitar 4.000 migran ilegal Irak di perbatasan Polandia Belarusia.

Sebagai bentuk pencegahan Pemerintah Polandia melakukan beberapa tindakan pencegahan gelombang migran ilegal yang memasuki wilayah perbatasan Polandia Belarusia, Berikut tabel yang menjelaskan beberapa Tindakan pencegahan yang dilakukan:

Tabel 17. Praktik Interdiction Pemerintah Polandia Tahun 2021-2022

Praktik <i>Interdiction</i>	Tindakan Pemerintah Polandia	Kategori
Pembangunan Pagar Pembatasan	Mendirikan tembok fisik sepanjang 186 km dengan kamera termal dan sensor	Pencegahan pergerakan migran
Penempatan militer dan polisi	Lebih dari 15.000 personel dikerahkan ke zona perbatasan, melakukan patroli sepanjang perbatasan untuk mengusir migran yang mau melewati perbatasan.	Pencegahan pergerakan migran
<i>Pushback</i> terhadap Migran	Migran yang berhasil melewati perbatasan akan dipaksa kembali ke Belarusia tanpa proses hukum.	Pencegahan dan Pengembalian migran
<i>State of Emergency</i>	Melarang akses bagi para jurnalis, aktivis kemanusiaan, dan pengamat internasional.	Pencegahan dan Pelarangan aktivis atau bantuan kemanusiaan

(**Sumber:** Amnesty International, 2022; Human Rights Watch, 2022; UNHCR, 2022; Ministry of Interior Poland, 2021)

Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa migrasi telah dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial. Migran tidak lagi diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai entitas yang harus dicegah dan dikendalikan.

Praktik intersepsi di Polandia menunjukkan bahwa negara mengkonstruksi hukum dan militer untuk mencegah dan penahan pergerakan migran ilegal yang dimana semua migran yang melakukan percobaan dan sudah menyebrangi perbatasan Polandia melalui Belarusia akan dianggap Ilegal dan menjadi target *interdiction*.

3.2.2 Detention of Immigrants Penahanan sebagai Praktik Represif dan Disipliner

Penahanan migran merupakan praktik administratif yang digunakan negara untuk mengontrol individu yang dianggap melanggar aturan migrasi. Dalam konteks krisis perbatasan Polandia dan Belarusia tahun 2021 - 2022, penahanan terhadap migran asal Timur Tengah menjadi bagian dari strategi sekuritisasi yang bersifat represif. Dalam pendekatan Philippe Bourbeau, sekuritisasi bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana migrasi dibingkai sebagai ancaman nyata melalui *security speech acts* dan tindakan institusional yang menyertainya (Bourbeau 2011, 38). Penahanan dalam konteks ini tidak sekadar berfungsi sebagai respons administratif, melainkan sebagai bagian dari *securitizing move* yang memperkuat narasi bahwa migran adalah entitas yang perlu dikendalikan dan dipisahkan dari masyarakat. Bourbeau menekankan bahwa keberhasilan sekuritisasi bergantung pada kekuatan ujaran ancaman, dukungan institusional, dan konteks sosial-politik yang memungkinkan penerimaan publik terhadap tindakan ekstrem (Bourbeau 2011, 45–52).

Di Polandia, praktik penahanan terhadap migran Timur Tengah mencakup berbagai bentuk kontrol dan pembatasan. Berikut ini adalah ringkasan dalam bentuk tabel untuk memperjelas bagaimana praktik penahanan terhadap migran Timur Tengah dilakukan di perbatasan Polandia–Belarusia pada tahun 2021–2022:

Tabel 18. Praktik Penahanan Migran Timur Tengah di Polandia Tahun 2021-2022

Kategori	Detail Praktik Penahanan
Lokasi Penahanan	<i>Guarded Centres (Bialystok, Kętrzyn, Lesznowola)</i> , Area 51 dekat perbatasan.
Proses Penahanan	Penangkapan, penahanan tanpa akses hukum, <i>pushback</i> ke Belarusia
Durasi Penahanan	Tidak pasti, bisa berbulan-bulan tanpa proses hukum
Jaminan atau Akses Hukum	Tidak tersedia, proses tidak transparan
Penahanan Anak dan Keluarga	Terjadi dan melanggar prinsip perlindungan anak
Perbedaan dari Penahanan Sebelumnya	Penahanan tahun 2021 - 2022 lebih represif, intimidatif, dan tidak sesuai standar hukum Uni Eropa.

(Sumber: Human Rights Watch, 2021)

Berdasarkan laporan dari *Global Detention Project and European Committee for the Prevention of Torture*, jumlah penahanan Migran di Polandia meningkat signifikan selama krisis, berikut data dalam bentuk ringkasan tabel dan grafik sebagai visualisasi fluktuasi penahanan sebelum krisis migrasi dan setelah proses sekuritisasi tahun 2020-2022:

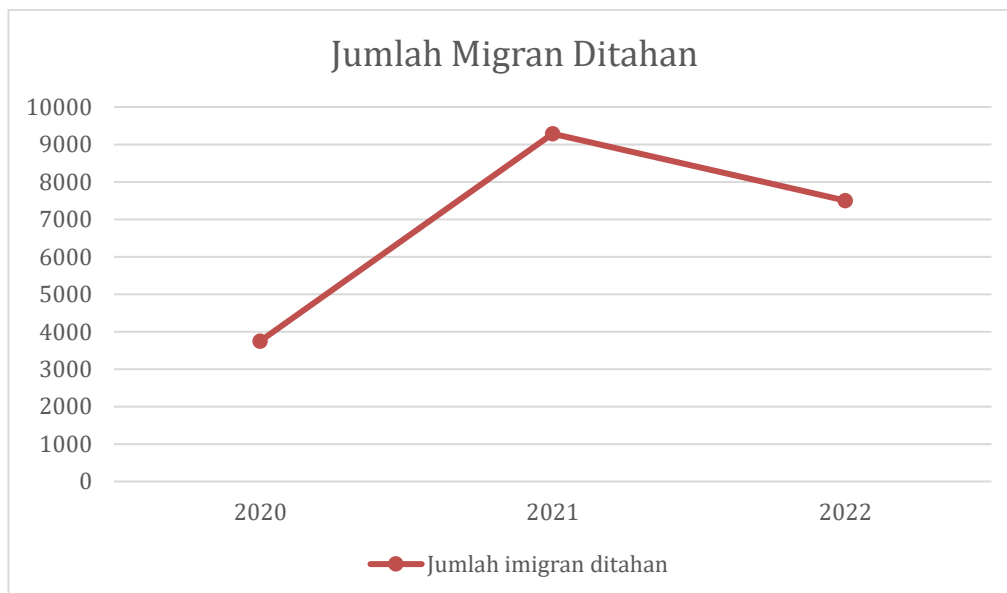
Tabel 19. Jumlah Migran Timur Tengah yang ditahan 2020-2022

Tahun	Jumlah Migran Ditahan	Keterangan	Asal Negara Dominan	Jenis Penahanan
2020	3.750 orang	Sebelum krisis	Irak, Suriah	Administratif
2021	9.287 orang	Lonjakan ekstrem (masa krisis)	Irak, Afganistan, Suriah	Represif
2022	7.500 orang	Penurunan pasca sekuritisasi	Irak, Suriah, Sudan	Disipliner

(Sumber: Gov.pl, 2022; Human Rights Watch, 2022)

Lonjakan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penahanan migran mulai dianggap sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional, ini mencerminkan proses sekuritisasi secara institusional. Sementara itu, penurunan pada tahun 2022 menandakan proses de-sekuritisasi, di mana praktik represif mulai dianggap normal dan dilembagakan sebagai bagian dari prosedur administratif.

Grafik 3. Jumlah Migran Timur Tengah yang Ditahan 2020-2022



(Sumber: Gov.pl, 2022; Human Rights Watch, 2022)

Grafik penahanan Migran di Polandia dari 2020 hingga 2021 menunjukkan tren peningkatan tajam selama krisis perbatasan dengan Belarusia. Penurunan lonjakan penahanan pada 2022 (7.500 orang) menunjukkan bahwa kebijakan keamanan telah menggantikan pertimbangan kemanusiaan, menjadikan penahanan sebagai norma dalam pengelolaan Migran.

Transformasi penahanan dalam pengelolaan migrasi menunjukkan bahwa sekuritisasi telah berakar secara institusional. Dalam kerangka Bourbeau (2011), proses ini tidak hanya bergantung pada praktik koersif seperti *interdiction* dan *detention*, tetapi juga pada indikator institusional yang mendasarinya: kerangka hukum, pernyataan kebijakan, dan tingkat urgensi isu dalam wacana publik (*legal, policy statement, saliency*). Ketiga elemen ini membentuk landasan yang memungkinkan tindakan represif negara terhadap migran Timur Tengah dilegitimasi dan direproduksi secara sistematis.

Tabel 20. Summarize Indicators, sekuritisasi migrasi Polandia terhadap Migran Timur Tengah tahun 2021 – 2022

Kategori Indikator	Indikator	Polandia (2021 – 2022)	Keterangan Praktik
<i>Institutional</i>	<i>Legal (I-1)</i>	Ya	Undang-undang darurat perbatasan dan kebijakan penolakan akses suaka diberlakukan secara resmi
	<i>Policy Statement (I-2)</i>	Ya	Pernyataan resmi pemerintah menyebut migrasi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan integritas negara
	<i>Saliency (I-3)</i>	Ya	Isu migrasi menjadi pusat perhatian politik dan media selama krisis perbatasan dengan Belarusia
<i>Securitization Nexus</i>	<i>Interdiction (P-1)</i>	Ya	Pembangunan pagar perbatasan, penempatan militer, dan praktik <i>pushback</i> terhadap migran
	<i>Detention of Immigrants (P-2)</i>	Ya	Penahanan migran di fasilitas tertutup, termasuk anak-anak dan keluarga, tanpa proses hukum yang transparan
Hasil Sekuritisasi	<i>Securitization Outcome (O-1)</i>	Kuat	Migrasi dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial; kebijakan eksklusiver dilegitimasi secara nasional

(Sumber: Bourbeau, 2011)

Bagian ini menyajikan rangkuman indikator yang mengilustrasikan bagaimana sekuritisasi migrasi di Polandia selama 2021–2022 beroperasi melalui kombinasi antara legitimasi hukum dan intensifikasi wacana ancaman. Dengan menggabungkan praktik interdiksi di perbatasan dan penahanan administratif, serta dukungan institusional melalui regulasi dan narasi politik, pemerintah Polandia membentuk sekuritisasi yang bersifat represif dan defensif. Visualisasi ini memperjelas bagaimana migrasi diposisikan sebagai isu keamanan yang memerlukan intervensi negara secara menyeluruh.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons Pemerintah Polandia terhadap krisis migrasi di perbatasan Belarusia pada periode 2021–2022 merupakan manifestasi jelas dari proses sekuritisasi migrasi sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Philippe Bourbeau. Proses ini tidak hanya bersifat retorik, tetapi telah terlembagakan secara sistematis melalui dimensi institusional dan praktik keamanan yang represif.

Pertama, pada dimensi institusional (*Indicator – I*), sekuritisasi diwujudkan melalui:

Komponen Hukum (*Legal Component/I-1*): Pemerintah Polandia merevisi dan memberlakukan seperangkat regulasi darurat yang mengintegrasikan migrasi ke dalam kerangka keamanan nasional. *Act on Foreigners* (khususnya Pasal 303b), *Polish Border Guard Act*, dan *State of Emergency Regulation* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melegitimasi praktik pushback, deportasi cepat tanpa proses hukum lengkap, serta pembatasan akses bagi media dan organisasi kemanusiaan. Regulasi ini mengubah migrasi dari isu administratif menjadi ancaman hukum yang memerlukan respons ekstra-ordinary.

Pernyataan Kebijakan (*Policy Statement/I-2*): Para aktor negara utama, Perdana Menteri Mateusz Morawiecki, Menteri Dalam Negeri Mariusz Kamiński, dan Presiden Andrzej Duda secara konsisten membingkai kedatangan migran Timur Tengah sebagai "serangan hibrida", "ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas nasional", serta "risiko terhadap identitas budaya Polandia dan Uni

Eropa". Wacana ini berfungsi sebagai *speech act* yang menjustifikasi tindakan-tindakan luar biasa.

Tingkat *Visibilitas (Saliency/I-3)*: Isu migrasi berhasil mendominasi agenda publik dan politik. Media arus utama (terutama TVP dan Gazeta Polska) mereproduksi narasi ancaman, sementara survei opini publik (CBOS) menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan keras pemerintah. Dominasi wacana ini menciptakan *receptive audience* yang mengamini konstruksi ancaman, sehingga memuluskan penerapan kebijakan sekuritisasi.

Kedua, pada dimensi praktik keamanan atau securitization nexus (Indicator – P), konstruksi ancaman tersebut dioperasionalkan melalui:

Intersepsi (*Interdiction/P-1*): Pemerintah Polandia menerapkan tindakan pencegahan fisik dan koersif, termasuk pembangunan tembok perbatasan sepanjang 186 km, pengerahan masif militer dan polisi, serta praktik sistematis pushback yang memaksa migran kembali ke wilayah Belarusia tanpa penilaian status perlindungan. Tindakan ini mendehumanisasi migran dan menegaskan logika pertahanan perbatasan.

Penahanan (*Detention of Immigrants/P-2*): Migran yang berhasil masuk ditahan dalam fasilitas *Guarded Centres* dengan akses hukum yang terbatas dan durasi penahanan yang tidak pasti. Lonjakan jumlah penahanan pada 2021 (menjadi 9.287 dari 3.750 di tahun 2020) menunjukkan bagaimana penahanan beralih fungsi dari administratif menjadi instrumen represif dalam strategi keamanan nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa fenomena migrasi ireguler di perbatasan Polandia-Belarusia telah berhasil disekuritisasi. Migran Timur Tengah dikonstruksi bukan sebagai subjek hak yang memerlukan

perlindungan, melainkan sebagai objek ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional, integritas teritorial Uni Eropa, dan identitas sosial-budaya Polandia. Kebijakan yang diambil mencerminkan upaya untuk mengamankan kedaulatan melalui pendekatan represif yang dilegitimasi oleh wacana keamanan dan kerangka hukum darurat.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dari segi data dan ruang pembahasan. Dari sisi data, penelitian ini belum menggunakan data primer langsung dari para migran Timur Tengah yang terdampak kebijakan sekuritisasi di Polandia. Sebagian besar informasi berasal dari laporan media, LSM, dan dokumen resmi, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan pengalaman migran secara langsung. Selain itu, data statistik resmi dari pemerintah Polandia seperti jumlah penahanan, deportasi, atau permohonan suaka yang ditolak masih terbatas dan sulit diakses. Survei opini publik yang digunakan juga bersifat bias sehingga belum menggambarkan perubahan sikap masyarakat secara menyeluruh dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amelia, Shanti. 2022. "Standar Ganda Polandia Terhadap Pengungsi Dalam Kerangka Keamanan: Studi Kasus Krisis Pengungsi Tahun 2015 Dan 2022." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (Mei): 1-9.
- Anandita, R., Siregar, L., dan Pramuditya, A. 2022. "Kebijakan Polandia terhadap Migran Timur Tengah di Perbatasan Belarus." Jakarta: Pusat Kajian Migrasi Global.
- Anandita, R., Safitri Ayunabila., F., Safitri, D., Amalia, R. 2019. "Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi". *Journal of Airlangga University*.
- Balicki, Marcin. 2022. "Migration Management and Border Control in Poland." *Journal of Border Studies* 18 (2): 45–62.
- Baranowska, Grażyna. 2021. "Pushbacks and the Rule of Law: Poland's Legal Response to Irregular Migration." *European Journal of Migration and Law* 23 (4): 389–412.
- Boćkowski, Daniel. Migration Crisis on the Eastern Border of Poland, 2015–2022/24, as Part of a Multi-level Influence Operation of the Russian Federation. *Dzieje Najnowsze*, Vol. LVI – 2024. <https://www.academia.edu/128814213>
- Bohm, A. 2021. "Poland's Response to the Migration Crisis: A Comparative Analysis of Policies towards Ukrainian and Middle Eastern Migrants." *European Journal of Migration and Law* 23 (2): 115-139.
- Buras, Piotr. 2022. "Poland's Migration Policy: Challenges and Perspectives." *Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny* 48 (1): 85-102. <https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.020.16379..>
- Daaboul, Jessica. 2023. "Migration Policies at Poland-Belarus Border: Legal Challenges and Humanitarian Implications." *European Migration Studies Journal* 12 (2): 45-62.
- European Council on Refugees and Exiles (ECRE). AIDA Country Report: Poland 2021 Update. May 2022. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/05/AIDA-PL_2021update.pdf
- Kaczmarczyk, P. 2021. "The Polish Immigration Policy: Addressing the Ukrainian and Middle Eastern Migrants." *Polish Journal of Political Science* 28 (1): 45-64.
- Łodziński, Sławomir, dan Marek Szonert. 2022. "Polish Migration Policy in the Face of the Ukrainian Refugee Influx." *Migration and Society* 10 (2): 83-98.
- Makhroja, Fikri. 2020. "Islam, Identitas, dan Migrasi di Eropa Timur: Studi Kasus Polandia." *Jurnal Politik Global* 12(3): 145–162.
- Makhroja, Mega Nisfa. 2020. "Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 2(1): 45–60. <https://journal.uui.ac.id/IJPSS..>
- Nainggolan, D. 2021. "Polandia dan Krisis Perbatasan Belarus: Antara Keamanan dan Kemanusiaan." *Analisis Geopolitik Timur Tengah* 9(2): 98–110.

- Office for Foreigners (Poland), PL NCP EMN. *EMN Annual Report on Migration and Asylum, Part 2: Poland 2022*. Warsaw: European Migration Network, Agustus 2023. <https://www.gov.pl/web/european-migration-network>.
- Office for Foreigners (Poland), PL NCP EMN. *EMN Annual Report on Migration and Asylum, Part 2: Poland 2021*. Warsaw: European Migration Network, 2022. <https://www.gov.pl/web/european-migration-network>.
- Office for Foreigners (Poland), PL NCP EMN, dan Eurostat. *EMN Country Factsheet: Poland 2022*. Warsaw: European Migration Network, Agustus 2023. <https://www.gov.pl/web/european-migration-network>.
- Rahma, Salsabila. 2021. "Migrasi sebagai Strategi Politik Lintas Negara: Dinamika Belarus–Polandia." *Jurnal Hubungan Internasional* 15(1): 55–70.
- Rusilowicz, Karolina, dalam kolaborasi dengan Ewa Ostaszewska-Żuk dan Maja Łysienka, dengan dukungan Helsinki Foundation for Human Rights, dan disunting oleh European Council on Refugees and Exiles (ECRE). *Country Report: Poland (2021 Update)*. Brussels: European Council on Refugees and Exiles, 2021. Bagian dari Asylum Information Database (AIDA). <https://www.asylumineurope.org/>.
- Szulecka, Monika, dan Klaus, Witold. 2025. "Poland's Migration Policy and the Rule of Law." *Journal of Border Studies* 18(2): 112–130.
- Szulecka, Monika, and Klaus, Witold. 2025. "Hybrid Threats and Migration: Poland's Response to the Belarus Border Crisis." *Migration and Security Review* 7 (1): 15–34.
- Widerski, Paweł. 2024. "The Legal Framework for Assisting Displaced Persons from Ukraine in Meeting Their Housing Needs in Poland." *Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law* 14 (1): 60-82. <https://tribunajuridica.eu/arhiva/y14v1/4.%20Pawel%20Widerski.pdf>.
- Zdanowicz, Mateusz. 2023. "Routes of Middle Eastern Migrants to the EU via Belarus." *Migration Monitor* 11 (3): 78–91.
- Zdanowicz, Mateusz. 2023. "Migration Crisis at the Polish-Belarusian Border: Political and Legal Dimensions." *Central European Journal of Politics* 9(1): 33–50.
- Zieliński, Tomasz. 2018. "The Politics of Immigration in Poland: National Identity and Security Concerns." *International Studies Review* 20 (4): 543-558.

Buku

- Bourbeau, Philippe. 2011. *The Securitization of Migration: A Study of Movement and Order*. London: Routledge.
- Chmielowski, Aleksandra. *Polish Migration Law and Policy*. Warsaw: [Publisher], 2022.
- Duszczyk, Maciej, dan Katarzyna Matuszczyk. *The Reception of Ukrainian Refugees in Poland: Solidarity in Action*. Warsaw: University of Warsaw Press, 2022.
- European Union Agency for Asylum (EUAA). 2023. *Providing Temporary Protection to Displaced Persons from Ukraine: A Year in Review*. EUAA Publications, Maret 2023. https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-03/2023_temporary_protection_year_in_review_EN.pdf.

- Huysmans, Jef. 2006. *The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU*. London: Routledge.
- Kucharczyk, Jacek. *Poland's Humanitarian Response to the Ukrainian Crisis*. Warsaw: Institute of Public Affairs, 2022.
- Komenda Główna Straży Granicznej. "Nielegalne przekroczenia granicy z Białorusią w 2021 r." *Straż Graniczna*, 12 Januari 2022. Halaman diarsipkan. Diakses 13 Januari 2026. <https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9689,Nielegalne-przekroczenia-granicy-z-Bialorusia-w-2021-r.html>.
- Polish Government. *Act of December 12, 2013 on Foreigners*. Warsaw: Ministry of Interior and Administration, 2013. <https://cudzoziemiecwpolsce.pl/wp-content/uploads/2014/10/ACT-of-12-December-2013-on-foreigners-in-English.pdf>.
- Wiśniewski, Tomasz. 2020. "The Polish Refugee Policy and Its Impact on the Integration of Migrants." *In Refugee Policy in Central Europe*, disunting oleh Joanna Czerwińska, 135-150. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50979-8_10.

Situs Web

- ACAPS. 2022. Poland-Belarus Border Crisis: Migration and Securitization. Geneva: ACAPS. <https://www.acaps.org>.
- ACAPS. 2022. *Poland-Belarus Border Crisis: Humanitarian Overview*. <https://www.acaps.org>.
- Al Jazeera. 2021. "Poland's Border Crisis: Migrants Trapped in No Man's Land." *Al Jazeera News*, November 5, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/5/polands-border-crisis-migrants-trapped-in-no-mans-land>.
- Amelia, Shanti. 2022. "Standar Ganda Polandia Terhadap Pengungsi dalam Kerangka Keamanan: Studi Kasus Krisis Pengungsi Tahun 2015 dan 2022." *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/Standar_Ganda_Polandia.
- Amnesty International. 2021. "Middle Eastern Migrants: Barriers to Immigration and Security Screening." Diakses [tanggal akses]. <https://www.amnesty.org>. https://www.cbos.pl/EN/publications/cbos_news_text.php?no=42/2021
- Amnesty International. 2022. "Poland: Detention Conditions for Migrants." Accessed August 29, 2025. <https://www.amnesty.org>.
- Amnesty International. "Poland: Pushbacks and Detention of Migrants." 2022
- Balicki, Marcin. 2022. "Poland's Border Policy and Migrant Pushbacks." *Migration Policy Institute*. <https://www.migrationpolicy.org>.
- Baranowska, Grażyna. 2021. "Legalising Pushbacks at the Polish Border: A Human Rights Perspective." *Verfassungsblog*. <https://verfassungsblog.de/legalising-pushbacks-poland>.
- CBOS. 2021. "Attitude to Refugees and the Situation of Migrants at the Border." *Public Opinion Research Center*. https://cbos.pl/EN/publications/reports/2021/111_21.pdf.
- Coakley, Amanda, and Patin, Thomas. 2022. "Poland's Border Wall and the Politics of Exclusion." *Foreign Policy*, February 10. <https://foreignpolicy.com>.

Coakley, Amanda, dan Patin, Nicolas. 2022. "Belarus's Weaponization of Migration." *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com..>

CGO Mobility. "Immigration to Poland: Analysis of Polish Immigration Trends 2021–2023." CGO Publications. Accessed September 7, 2025. <https://cgomobility.pl/en/publications/immigration-to-poland/>

European Parliament. n.d. "Charter of Fundamental Rights of the European Union." <https://www.europarl.europa.eu..>

European Parliament. n.d. *Polish Foreigners Act: Legal Framework for Asylum Seekers in Poland*. Diakses Juni 9, 2025. https://www.europarl.europa.eu/migration_policy..

European Council on Refugees and Exiles (ECRE). 2021. *Reception, Detention, and Restriction of Movement at EU External Borders*. Heinrich Böll Stiftung. Diakses pada 23 Agustus 2024 <https://ecre.org>

European Union Agency for Asylum (EUAA). 2023. "Providing Temporary Protection to Displaced Persons from Ukraine: A Year in Review." *EUAA Publications*, Maret 2023. https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-03/2023_temporary_protection_year_in_review_EN.pdf.

Global Detention Project. "Poland Immigration Detention Profile." Accessed September 2025. Global Detention Project. <https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/poland..>

Gov.pl.. 2022. "Amendments to the Act on Foreigners." Ministry of the Interior and Administration. <https://www.gov.pl/web/mswia..>

Gov.pl. . 2022. "Changes in the Act on Foreigners." *Office for Foreigners - Gov.pl*. <https://www.gov.pl/web/udsc-en/changes-in-the-act-on-foreigners..>

Gov.pl. . 2022. "The Law on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with the Armed Conflict." *Office for Foreigners - Gov.pl*. <https://www.gov.pl/web/udsc-en/the-law-on-assistance-to-ukrainian-citizens-in-connection-with-the-armed-conflict-on-the-territory-of-the-country-has-entered-into-force>.

Gov.pl. . 2022. *Ministry of Interior and Administration: Border Protection Reports*. <https://www.gov.pl..>

Human Rights Watch. 2022. "Die Here or Go to Poland: Belarus' Manufactured Migrant Crisis." <https://www.hrw.org/report/2022/06/20/die-here-or-go-poland/belaruss-manufactured-migrant-crisis>.

Human Rights Watch. 2022. *Poland: Refugee Crisis and Human Rights*. Diakses September 5, 2024. <https://www.hrw.org..>

Human Rights Watch. 2022. "Poland: Migrant Families and Children in Detention." Accessed August 29, 2025. <https://www.hrw.org..>

Human Rights Watch. "Poland: Children Among Those Detained at Border." 2022. <https://www.hrw.org/news/2022/02/17/poland-children-among-those-detained-border..>

Human Rights Watch. 2022. "Die Here or Go to Poland: Belarus's Abuse of Migrants." <https://www.hrw.org/report/2022/03/24/die-here-or-go-poland..>

Ministry of Interior Poland. 2021. "Statement on Hybrid Threats and Border Security." Accessed August 29, 2025. <https://www.gov.pl..>

Ministry of Interior Poland. "Statement on Border Crisis." 2021. <https://www.gov.pl/web/mswia-en..>

- Polish Border Guard. 2022. *Annual Report on Migration and Refugees in Poland*. Warsaw: Polish Border Guard. Diakses pada 13 september 2024
- Polish-Ukrainian Community Network. 2022. *Support for Ukrainian Refugees in Poland: Cultural and Social Integration Challenges*. Warsaw: Polish-Ukrainian Community Network.
- Reuters. 2022. "Poland Grants Special Protection to Ukrainian Refugees." *Reuters*, Maret 12, 2022. <https://www.reuters.com/world/europe/poland-grants-special-protection-ukrainian-refugees-2022-03-12/>..
- Refworld. 2013. "Poland: Act of 2013 on Foreigners." *Refworld*. <https://www.refworld.org/pd/54c0b9384.pdf>..
- UNHCR. 2022. "Poland: Legal Gaps in Migrant Detention." Accessed August 29, 2025. <https://www.unhcr.org>..
- UNHCR. *Global Trends: Forced Displacement in 2022*. June 2023. <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022>..
- UNHCR. "Observations on the Treatment of Asylum Seekers in Poland." 2022. <https://www.unhcr.org/pl/en/2022/06/unhcr-observations-on-the-treatment-of-asylum-seekers-in-poland/>.